

**PENGELOLAAN ZAKAT TERHADAP PENGENTASAN KEMISKINAN  
PADA BAZNAS KAB. SOPPENG**



Skripsi

**Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat meraih gelar  
Sarjana Hukum (S.H) Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah  
Pada Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Alauddin Makassar**

**Oleh**

**AHMAD ARSYI AFDALI  
11000117005**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UIN ALAUDDIN MAKASSAR**

**2021**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ahmad Arsyi Afdali  
Nim : 11000117005  
Tempat/Tgl. Lahir : Tajuncu, 25 Mei 1998  
Jur/Prodi/Konsentrasi : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah dan Hukum  
Alamat : Villa Samata Sejahtera Blok A2/28  
Judul Skripsi : Pengelolaan Zakat Terhadap Pengentasan Kemiskinan  
Pada BAZNAS Kab. Soppeng

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Gowa, 15 Agustus 2021

Penyusun



**AHMAD ARSYI AFDALI**  
**NIM : 11000117005**

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Assalamualaikum Warahmatullah Wabarakatuh*

*Alhamdulillahirabbil'alamin*, Tiada kata dan ucapan yang patut diucapkan kecuali ucapan *Tauhid* dan *Tasyakur* kehadirat Allah Swt. atas terealisasinya skripsi yang berjudul “**Pengelolaan Zakat Terhadap Pengentasan Kemiskinan Pada BAZNAS Kab. Soppeng**”, karena Dia-lah sumber kenikmatan dan sumber kebahagiaan. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad Saw. yang telah menyebarkan permadani-permadani Islam, serta menjadi tauladan, dan beliaulah yang telah menunjukkan jalan yang kebenaran kepada umat manusia.

Skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) pada jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar. Dalam penyelesaian skripsi ini, penulis sangat menyadari bahwa berhasilnya penulis dalam perkuliahan dan dalam menyelesaikan skripsi ini adalah berkat ketekunan dan bimbingan serta bantuan dari berbagai pihak.

Maka dari itu dengan segala kerendahan hati penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Prof. Dr. Hamdan Juhanis, M.A., Ph.D sebagai Rektor, Prof. Mardan, M.Ag, sebagai Wakil Rektor I (Bidang Akademik Pengembangan Lembaga), Dr. Wahyuddin, M.Ag, sebagai Wakil Rektor II (Bidang Adm. Umum dan Perencanaan Keuangan), Prof. Dr. Darussalam, M.Ag, sebagai Wakil Rektor III (Bidang Kemahasiswaan), serta seluruh staf Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar beserta jajarannya yang telah berusaha mengembangkan dan menjadikan kampus Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar menjadi kampus yang bernuansa Islam, mulia, berbudi pekerti luhur, dan beriptek.
2. Bapak Dr. H. Muammar Muhammad Bakry, Lc., M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
3. Bapak Ashar Sinilele, SH., M.M., MH, dan Bapak Muhammad Anis, S.Ag, MH, masing-masing selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
4. Bapak Dr. Nur Taufiq Sanusi, M.Ag., dan Ibu A. Intan Cahyani, S.Ag., M. Ag, masing-masing selaku Pembimbing I dan II yang senantiasa memberikan bimbingan, saran, dan motivasi dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini.
5. Bapak Dr. Alimuddin, M.Ag., dan Bapak Ashar Sinilele, S.H., M.M., M.H, masing-masing selaku Penguji I dan II yang memberikan kritik, saran, serta motivasi dalam penyusunan skripsi ini.

6. Seluruh dosen dan staf Akademik Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
7. Ayahanda H. Ambo Acok Iskandar, S.Ag., M.Ag. dan Ibunda Hj. Syamsiyah M, S.Ag. sebagai salah satu wujud cinta dan terima kasih penulis atas segala pengorbanan dalam mengasuh, mendidik, dan membiayai penulis dengan penuh rasa kasih sayang serta senantiasa selalu mendoakan kesehatan dan keberhasilan penulis.
8. Saudari yang tercinta dan tersayang Ruhadatul Aisyi, SE. beserta suaminya Khaerul M, SH. yang tak henti-hentinya memberikan dukungan demi kelancaran studi.
9. Terima kasih kepada pihak BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Kabupaten Soppeng yang telah meluangkan waktu dan tenaga serta dukungannya dalam membantu penulis menyelesaikan skripsi ini.
10. Terima kasih kepada para informan yang telah membantu penyusunan skripsi ini dalam memperoleh data penelitian.
11. Terima kasih kepada sahabat-sahabatku yang terkasih dan tersayang yang telah memberikan dukungan dan semangat selama penyusunan skripsi ini.
12. Teman-teman seperjuangan HES A. 2017 yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu, terimakasih atas segala dukungan dan motivasi yang diberikan kepada penyusun selama penyusunan skripsi ini.

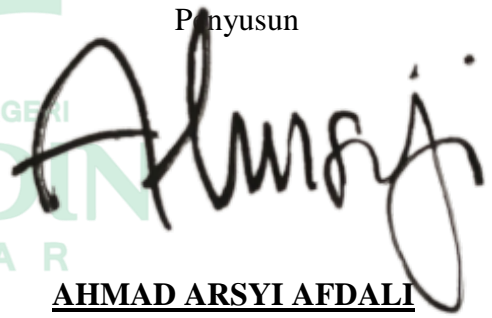
13. Terima kasih kepada segenap orang-orang yang telah mengambil bagian dalam penyelesaian skripsi ini namun tidak sempat dituliskan namanya. Terima kasih sebanyak-banyaknya, jerih payah kalian sangat berarti bagi penulis.

Demikian yang dapat penulis sampaikan. Besar harapan penulis skripsi ini dapat bermanfaat kedepannya. Mohon maaf apabila dalam penulisan ini terdapat banyak ketidak sempurnaan. Olehnya, penulis menerima kritik dan saran pembaca sebagai acuan penulis agar lebih baik kedepannya.

*Wassalamu Alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.*

Gowa, 15 Agustus 2021

Penyusun



**AHMAD ARSYI AFDALI**  
**NIM : 11000117005**

## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>viii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus.....	6
D. Kajian Pustaka .....	7
E. Tujuan dan Kegunaan .....	9
<b>BAB II TINJAUAN TEORETIS .....</b>	<b>10</b>
A. Tinjauan Umum Terhadap Zakat .....	10
B. Tinjauan Terhadap Pengentasan Kemiskinan.....	35
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>39</b>
A. Jenis dan Lokasi Penelitian .....	39
B. Pendekatan Penelitian .....	40
C. Sumber Data .....	40
D. Metode Pengumpulan Data.....	41

E. Instrumen Penelitian .....	42
F. Teknik Pengelolaan dan Analisis Data .....	43
G. Pengujian Keabsahan Data .....	43
<b>BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN.....</b>	<b>45</b>
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	45
B. Mekanisme Pengelolaan Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Soppeng.....	51
C. Hambatan Yang di Hadapi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Soppeng Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan.....	67
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>71</b>
A. Kesimpulan .....	71
B. Saran .....	72
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>74</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN.....</b>	<b>79</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>90</b>



## PEDOMAN TRANSLITERASI

### A. *Transliterasi Arab-Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

#### 1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	b	Be
ت	Ta	t	Te
ث	Sa	s	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	j	Je
ح	Ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	Er
ز	Zai	z	Zet
س	Sin	s	Es
ش	Syin	sy	es dan ye

ص	Sad	s	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	d	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	t	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	apostrop terbalik
غ	Gain	g	Ge
ف	Fa	f	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	hamzah	,	Apostop
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak ditengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
-	<i>Fathah</i>	A	A
-	<i>Kasrah</i>	I	I
-	<i>Dammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat, dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ	fathah dan ya	Ai	a dan i
اُ	fathah dan wau	Au	a dan u

## 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
...اِي..	<i>fathah dan alif atau ya</i>	A	a dan garis di atas
ي	kasrah dan ya	I	i dan garis di atas
و	dammah dan wau	U	u dan garis di atas

#### 4. *Ta Marbutah*

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua, yaitu : *ta marbutah* yang hidup atau mendapatkan *harakat fathah, kasrah, dan dammah*, yang transliterasinya adalah [t]. sedangkan *ta' marbutah* yang mati atau mendapatkan harakat sukun transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta' marbutah* itu transliterasinya dengan [h].

#### 5. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (ّ), dalam transliterasinya ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Jika huruf ع ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf

*kasrah* (ـِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi i.

## 6. *Kata Sandang*

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf (اَلْ) (*alif lam ma'rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiyyah maupun huruf qamariyyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung mengaitkannya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

## 7. *Hamzah*

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrop (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

## 8. *Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia*

Kata istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dari *al-Qur'an*), *sunnah*, *khusus dan umum*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasikan secara utuh.

## 9. *Lafz al-Jalalah* (الله)

Kata “Allah” didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudafī ilaihi* (frase nominal), ditransliterasikan tanpa huruf hamzah.

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalalah* ditransliterasi dengan huruf [t].

## 10. *Huruf Kapital*

Walau system tulisan Arab tidak mengenal huruf capital (All caps), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf capital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf capital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama dari (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Biila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf capital (AL-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-. baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK,DP, CDK, dan DR).

## ***B. Daftar Singkatan***

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	: <i>subhānahūwata, ālā</i>
saw.	: <i>sallallāhu „alaihiwasallam</i>
a.s.	: <i>„alaihi al-salām</i>
H	: Hijrah
M	: Masehi
SM	: Sebelum Masehi
l.	: Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w.	: Wafat tahun
Qs	: Quran Surah
HR	: Hadis Riwayat



## ABSTRAK

**Nama : Ahmad Arsyi Afdali**  
**Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah**  
**Nim : 11000117005**  
**Judul : Pengelolaan Zakat Terhadap Pengentasan Kemiskinan  
Pada BAZNAS Kab. Soppeng**

---

Pokok masalah dalam penelitian ini adalah Pengelolaan zakat terhadap pengentasan kemiskinan pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Soppeng. Pokok masalah tersebut selanjutnya diuraikan dalam beberapa sub masalah, yaitu: 1) Bagaimana mekanisme pengelolaan zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Soppeng ? 2) Hambatan apa saja yang dihadapi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Soppeng ?. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan jenis data “kualitatif”, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan teologis normatif, dan sosio kultural, sumber data yang pertama adalah sumber data primer yang terdiri dari informan, responden. Kedua, sumber data sekunder yang bersumber dari buku, jurnal, artikel, dan penelitian sebelumnya. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan: 1) Mekanisme pengelolaan zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Soppeng meliputi proses perencanaan, pengorganisasian, dan pelaksanaan yang mengatur mengenai a) Penghimpunan dana zakat dari para muzakki untuk diberikan kepada para mustahiq, serta b) Pendistribusian dan Pendayagunaan zakat yang terbagi menjadi dua macam yaitu bantuan konsumtif dan bantuan produktif. 2) Hambatan yang dihadapi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Soppeng dalam upaya mengentaskan kemiskinan yaitu tidak terdapat sanksi yang tegas dalam Undang-Undang Pengelolaan Zakat, keterbatasan dana, kesadaran berzakat bagi para muzakki pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Soppeng sangat minim. Upaya yang dilakukan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Soppeng yaitu : membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ), memberikan kemudahan bagi para muzakki, serta penyaluran zakat secara tunai.

***Kata Kunci: Pengelolaan, Zakat, Pengentasan, Kemiskinan.***



## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### **A. Latar Belakang**

Islam sebagai agama universal dan mayoritas di Indonesia, menjadikan Al-Qur'an sebagai pedoman hidup bagi umat manusia yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Maka dari itu, masyarakat dalam menjalani kehidupan dapat menerima islam tanpa harus ada “konflik” antar sesama masyarakat. Kehadiran Nabi Muhammad saw dapat di maknai dalam kerangka pembebasan kedamaian dan kesejahteraan manusia melalui ajaran yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnahnya.<sup>1</sup> Dalam upaya mengatasi kemiskinan, Islam mempunyai banyak cara untuk mesejahterahkan umatnya yang salah satunya dengan menerapkan konsep zakat yang terdapat pada rukun Islam yang ke-4 dari 5 rukun Islam.

Zakat merupakan salah satu ciri dari sistem ekonomi Islam, karena zakat merupakan salah satu implementasi azas keadilan dalam Islam. Secara terminologis zakat berarti tumbuh dan berkembang, kesuburan atau bertambah atau dapat pula berarti membersihkan atau menyucikan. Adapun secara etimologis (*syara'*), zakat diartikan sebagai sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah untuk diserahkan kepada golongan yang berhak (*asnaf zakat*), di samping mengeluarkan sejumlah lain sebagai infak dan sedekah.<sup>2</sup>

Kewajiban akan menunaikan zakat merupakan kewajiban Ilahiyah yang mengajarkan untuk memiliki kepedulian terhadap fakir miskin dengan cara

---

<sup>1</sup> Andi Safriani, *Positivisasi Syariat Islam di Indonesia*, Al-Qadau 4, no. 2 (2017), h. 314

<sup>2</sup>Rahmad Hakim, *Manajemen Zakat : Histori, Konsepsi, dan Implementasi*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2020), h.1

menolong, serta meringankan beban yang mereka pikul. Tujuan utama dalam menunaikan zakat adalah agar terjadinya keseimbangan antara orang yang kelebihan dana dengan orang yang kekurangan dana.

Perintah tentang pelaksanaan zakat tercantum dalam ayat-ayat Al-Qur'an di antaranya sebagai berikut:

- a. Firman Allah dalam QS. At-Taubah/9:103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا...

Terjemahnya :

<sup>1</sup>“Ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan menyucikan mereka...”

- b. Firman Allah dalam QS. Al-Baqarah/2:43

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Terjemahnya :

“Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku.”<sup>2</sup>

Harta telah menjadi kebutuhan dalam kehidupan manusia yang dikumpulkan tanpa batas untuk memenuhi kelangsungan hidup serta mencukupi segala kebutuhan yang diperlukan. Itulah sebabnya manusia berlomba-lomba mencari harta, karena semakin banyak harta yang didapat maka semakin mudah seseorang menunaikan zakat.

---

<sup>1</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Mekar Surabaya, 2000), h. 237

<sup>2</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 8

Indonesia termasuk dalam salah satu negara dengan populasi penduduk Muslim terbesar di dunia, sehingga keberadaan zakat di Indonesia mempunyai potensi yang sangat besar. Apabila pengelolaan zakat dapat di optimalkan dengan baik maka akan mendapatkan dampak positif yakni mengentaskan kemiskinan yang masih menjadi persoalan utama pemerintah Indonesia.

Kemudian tingkat kemiskinan masih cukup tinggi menjadi perhatian pemerintah, apalagi dengan adanya pandemi Covid-19 ini menjadikan kondisi ekonomi negara ini mengalami penurunan ekonomi yang otomatis mempengaruhi kondisi keuangan rakyat. Serta menjadi persoalan besar di Indonesia apalagi semenjak pandemi ini tingkat kemiskinan dan pengangguran semakin tinggi, sehingga berdampak pada stabilitas politik di Indonesia.

Menjadi perhatian besar juga mengenai masyarakat yang mengalami kesusahan dan kesulitan dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya serta kesusahan dalam mensejahterahkan keluarganya karena himpitan ekonomi. Peran zakat dalam mengentaskan kemiskinan tentu tidak dapat dipungkiri sudah menjadi hal yang umum, akan tetapi peran zakat tidak hanya terbatas pada pengentasan kemiskinan namun juga berperan dalam memperbaiki hubungan sosial antar individu maupun masyarakat.

Islam memandang kemiskinan merupakan suatu hal yang dapat merusak tatanan keimanan dan sosial masyarakat. Islam pun menganggapnya sebagai musibah yang harus segera ditanggulangi. Maka dari itu setiap orang didorong untuk menjadi muzakki yang dimana setiap muzakki berperan dalam mengatasi kemiskinan, maksudnya harapan tersebut ditujukan untuk orang yang mampu serta kepada penyandang kemiskinan itu sendiri.

Pola hidup seperti itu diharapkan tumbuh dikalangan semua masyarakat, khususnya orangkaya dan yang mempunyai penghasilan tinggi. Kesenjangan antara orang kaya dan orang miskin sangatlah menonjol, kesenjangan tersebut dapat dikurangi dengan memajukan peningkatan amal sosial di kalangan orang kaya dan menjauhkan perilaku boros.

Pembahasan tentang pengentasan kemiskinan pada hakikatnya adalah dengan mengentaskan penyebabnya. Agar seseorang dapat menunaikan zakatnya untuk mengentaskan kemiskinan, maka perlu diketahui penyebab kemiskinan yang terjadi terhadap individu maupun satu kelompok masyarakat. Setiap penyebab kemiskinan diobati dengan formula yang berbeda, meliputi :

1. Kemiskinan yang disebabkan oleh faktor kekurangan dan kelemahan fisik yang menjadi penghalang mendapatkan penghasilan yang besar;
2. Kemiskinan yang disebabkan oleh minimnya kemampuan mencari pekerjaan, karena tertutupnya pintu-pintu yang halal sesuai keadaan fakir miskin;
3. Kemiskinan yang disebabkan oleh pendapatan yang tidak mencukupi kebutuhan hidupnya, meskipun mereka mempunyai penghasilan tetap.<sup>3</sup>

Jika berbicara mengenai realitas sosial, masih sangat banyak *mustahiq* yang mendapatkan pemberian zakat yang tidak mencukupi dari segi kualitas, artinya kurangnya nilai yang didapatkan fakir miskin untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Padahal yang harus diperhatikan adalah bukan Cuma dari segi kuantitas penerima zakat menjadi patokan untuk dijangkau, tetapi dari segi kualitasnya pun mesti harus diperhatikan karena jika kualitas bantuan zakat baik otomatis mampu menjadi modal

---

<sup>3</sup>Nur Qomari, *Zakat: Solusi Pengentasan Kemiskinan*, Iqtishodia Jurnal Ekonomi Syariah, Vol.2 No.2 (2017), h.21

usaha bagi penerimanya. Apabila cara ini dilakukan secara bertahap dan konsisten, maka akan terjadi perubahan yang positif yakni berkurangnya jumlah *mustahiq* setiap tahunnya dan akan menambah jumlah *muzakki* dikarenakan usaha yang mereka bangun dari modal bantuan zakat.

untuk menindak lanjuti pengentasan ekonomi melalui bantuan zakat, tentu harus ada wadah untuk menampung semua bantuan zakat yang datang dari *muzakki*. Maka dari itu dibentuklah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebagai wadah pengelolaan zakat yang diharapkan dapat memberikan kontribusi yang nyata untuk lebih mengoptimalkan dana zakat sebagai solusi untuk menangani kemiskinan.

Agar mengkaji lebih dalam lembaga Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), maka penelitian ini ingin menelisik lebih jauh peran BAZNAS di wilayah Kab. Soppeng, topik ini diambil untuk mengkaji tentang teori peran (*role theory*) yang dimana Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sendirilah yang memainkan peran sebagai pengelola atau wadah dari pendistribusian zakat di masing-masing daerah. Apabila Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) terbukti memberikan peran positif terhadap pengentasan kemiskinan khususnya di wilayah Kab. Soppeng, maka lembaga sebagai wadah bantuan zakat ini harus kita dukung sepenuhnya.

Harapan yang ingin dicapai adalah bagaimana zakat ini betul-betul menjadi jalan keluar dalam pengentasan kemiskinan yang kemudian ditopang dengan adanya Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Selanjutnya, pada penelitian ini kita juga dapat mengetahui apakah zakat beserta Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) berperan mengentaskan kemiskinan atau tidak berperan. Serta diharapkan adanya solusi jitu dalam mengurangi angka kemiskinan terkhusus di wilayah Kab. Soppeng.

### ***B. Rumusan Masalah***

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut dapat dikemukakan pokok masalah sebagai berikut ini:

Pengelolaan Zakat Terhadap Pengentasan Kemiskinan Pada BAZNAS Kab. Soppeng. Berdasarkan pokok masalah tersebut dapat dikemukakan sub masalah berikut ini :

1. Bagaimana Mekanisme Pengelolaan Zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Soppeng ?
2. Hambatan apa saja yang dihadapi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Soppeng dalam upaya mengentaskan kemiskinan ?

### ***C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus***

#### **a. Fokus Penelitian**

Fokus penelitian dalam karya tulis ini adalah :

1. Pengentasan Kemiskinan
- b. Deskripsi Fokus

Agar mengurangi kesalah pahaman dalam mendefenisikan dan memahami penelitian ini, maka penulis akan mendefenisikan dan memberikan pemahaman tentang penelitian ini, serta akan mendeskripsikan judul yang di anggap penting :

1. Pengentasan Kemiskinan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, serta masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan

kecil, serta program lain dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi.<sup>4</sup>

pada kajian tentang peran zakat dalam pengentasan kemiskinan pada baznas kab. Soppeng.

#### **D. Kajian Pustaka**

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan literature meliputi :

1. Fajri Mas Afifah dengan judul “Peran Lembaga Islam dalam Mengentaskan Kemiskinan (Studi Kasus pada Baitul Maal Hidayatullah Cabang Malang)” Tahun 2015. Skripsi ini menguraikan tentang cara mengatur dan mengontrol ekonomi dalam dunia islam. Di Indonesia belum menggunakan lembaga ZISWAF dengan baik, maka dari itu penulis memberikan hipotesis mengenai peran ZISWAF, baitul maal, dan lembaga islam lainnya.<sup>5</sup>  
Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan adalah pada penelitian tersebut hanya mengkaji tentang fungsi institusi dalam mengontrol ekonomi, sedangkan penelitian yang akan dilakukan berfokus kepada peran lembaga zakat serta hambatan-hambatan apa yang menjadi kendala dalam mengentaskan kemiskinan.
2. Mardhiyah Hayati dengan judul “Peran Pemerintah dalam Pengelolaan Zakat dalam Rangkat Penganggulungan Kemiskinan dan Peningkatan Pendidikan di Indonesia” Tahun 2012. Jurnal ini mengkaji terkait peran pemerintah pemerintah dan ulama dalam mengoptimalkan pengelolaan zakat, dengan

---

<sup>4</sup>Peraturan Presiden Republik Indonesia, “*Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 166 tahun 2014 tentang pengentasan kemiskinan*”. (Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM, 2014), h. 3

<sup>5</sup>Fajri Mas Afifah, *Peran Lembaga Islam dalam Mengentaskan Kemiskinan (Studi Kasus pada Baitul Maal Hidayatullah Cabang Malang)*, Skripsi, (Malang: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, 2015), h.1

tujuan agar zakat dapat benar-benar menjadi solusi pengentasan kemiskinan di Indonesia.<sup>6</sup>

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan adalah penelitian tersebut menguraikan bahwa peran pemerintah dan ulama dalam mengoptimalkan zakat untuk mencegah kemiskinan di Indonesia. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan itu membahas mengenai bagaimana peran zakat untuk mencegah pengaruh kemiskinan terhadap masalah ekonomi, sosial, dan politik serta hambatan-hambatan apa saja yang dialami Baznas dalam menyalurkan zakat .

3. Irsyad Andrianto dengan judul “Strategi Pengelolaan Zakat dalam Pengentasan Kemiskinan” Tahun 2011. Jurnal ini menguraikan tentang tujuan zakat untuk mengentaskan kemiskinan benar-benar terwujud dengan melalui pembaharuan strategi pengelolaan zakat.<sup>7</sup>

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan adalah dalam penelitian tersebut membahas mengenai pembaharuan-pembaharuan apa yang efektif dalam pengelolaan zakat. Sedangkan penelitian yang dilakukan yakni membahas mengenai peran serta hambatan-hambatan apa saja yang mengganggu proses zakat dalam mengentaskan kemiskinan.

---

<sup>6</sup>Mardhiyah Hayati, *Peran Pemerintah dalam Pengelolaan Zakat dalam Rangka Penganggulangan Kemiskinan dan Peningkatan Pendidikan di Indonesia*, 4, no 2 (2012).

<sup>7</sup>Irsyad Andrianto, *Strategi Pengelolaan Zakat dalam Pengentasan Kemiskinan*, 19, no 1 (2011).



## ***E. Tujuan dan Kegunaan***

### **1. Tujuan**

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah menjawab rumusan masalah yang di paparkan di atas, yaitu sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui dan memahami mekanisme pengelolaan Zakat terhadap pengentasan kemiskinan pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kab. Soppeng.
- b. Untuk mengetahui dan memahami hambatan yang dihadapi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dalam upaya mengentaskan kemiskinan.

### **2. Kegunaan**

Kegunaan penelitian ini dapat dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu kegunaan umum dan kegunaan khusus.

1. Kegunaan umum dalam penelitian ini adalah memberikan sumbangan pemikiran bagi ilmu pengetahuan khususnya dalam hal Zakat.
2. Adapun kegunaan khusus dalam penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:
  - a. Temuan dalam penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai data awal guna melakukan penjelajahan lebih lanjut dalam bidang kajian yang sama atau dalam bidang kajian yang memiliki keterkaitan dengan pembahasan dalam penelitian ini.
  - b. Diharapkan dapat membantu memberikan masukan atau sumbangan pemikiran bagi Pemerintah ataupun Lembaga-lembaga Zakat dalam upaya mengentaskan kemiskinan.

## BAB II

### TINJAUAN TEORITIS

#### A. Tinjauan Umum Terhadap Zakat

##### 1. Pengertian Zakat

Zakat dalam terminologi mempunyai beberapa arti, yaitu *Al-Barakatu* “keberkahan”, *Al-Namaa* “pertumbuhan dan perkembangan”, *Ath-Thahaaratu* “kesucian”, dan *Ash-Shalahu* “keberesan”.<sup>1</sup> Sedangkan dalam etimologi yaitu zakat bermakna mengeluarkan sebagian harta (tertentu) yang telah diwajibkan Allah Swt. untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya, dengan kadar haul tertentu serta memenuhi syarat dan rukunnya.<sup>2</sup>

Zakat menjadi ajaran pokok yang menjadi salah satu rukun islam yang kelima yang urutannya berada pada urutan ketiga setelah syahadat dan shalat. Karena itulah zakat memiliki kedudukan yang penting dalam islam yang secara garis besar terdiri dari zakat maal (harta) dan zakat fitrah (jiwa).<sup>3</sup> Selain itu zakat merupakan ibadah yang bersifat sosial dalam tatanan kehidupan bermasyarakat sangat bermanfaat dari pada sifatnya individual, hal ini dikarenakan faktor kemanfaatannya yang timbul dan dapat dirasakan oleh banyak orang.<sup>4</sup> Zakat jika ditinjau dari dua sisi sangat membawa dampak yang baik serta memberikan keberkahan yakni dari sisi pribadi zakat

---

<sup>1</sup>Majma Lughah Al-Arabiyyah, *Al-Mu'jam Al-Wasith*, (Mesir: Daar El-Ma'arif, 1972), h. 396

<sup>2</sup>Qodariah Barkah, dkk, *Fikih Zakat, Sedekah, dan Wakaf*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2020), h. 4

<sup>3</sup>Mundzier Suparta, *Pendidikan Agama Islam Fiqhi*, (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 2010), h.20

<sup>4</sup> Patimah, Muhammad Asri, *Penyaluran Zakat, Infak, Sedekah di LAZNAS Yatim Mandiri Makassar Perspektif Hukum Islam (2019-2020)*, QadauNa 2, no. 2 (2021), h. 218

berfungsi untuk menyucikan harta dan diri pemiliknya, kemudian pada sisi lain zakat mengandung makna sosial yang sangat tinggi.<sup>5</sup>

Adapun menurut makna fikih, pengertian zakat itu sendiri adalah menurut berbagai pandangan ulama pada dasarnya hampir sama, yaitu zakat merupakan pengeluaran yang diwajibkan atas harta tertentu kepada pihak tertentu dengan cara tertentu dan bagaimana zakat itu dilaksanakan sesuai dengan syariat islam.<sup>6</sup> Jika dirumuskan, zakat adalah bagian dari harta yang wajib diberikan oleh setiap muslim yang memenuhi syarat kepada orang-orang tertentu, dengan syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat tertentu yang dimaksud adalah nisab, kadar, dan haulnya.<sup>7</sup>

Beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa zakat merupakan harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim kemudian diberikan kepada yang berhak sesuai syarat yang ditentukan, kemudian zakat menyucikan harta dan diri dan membangun rasa sosial kepada sesama manusia.

## **2. Dasar Hukum Zakat**

### **a. Hukum Islam**

Hukum Islam merupakan hukum yang bersumber dari al-Qur'an dan hadist sebagai sumber primer.<sup>8</sup> Berikut beberapa dalil tentang kewajiban zakat dalam Al-Qur'an:

---

<sup>5</sup>Masdhar F. Mas'udi dkk, *Reinterpretasi Pendayagunaan ZIS Menuju Efektifitas Pemanfaatan Zakat, Infak, Shadqah*, (Jakarta: Piramedia, 2004), h.17

<sup>6</sup>Bank Indonesia, *Pengelolaan Zakat Yang Efektif: Konsep dan Praktik di Beberapa Negara*, (Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah-Bank Indonesia, 2016), h.58

<sup>7</sup>Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, (Jakarta:Universitas Indonesia,UI-Press, 1988), h.39

<sup>8</sup> Supardin, *Produk Pemikiran Islam di Indonesia*, Al-Qadau 4, no.2 (2017), h.224.

1. Firman Allah Swt dalam QS.Ar-Rum/30:39

...وَمَا آتَيْتُمْ مِّنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ ﴿٣٩﴾

Terjemahnya :

“....Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk memperoleh keridhaan Allah, maka itulah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya)”<sup>9</sup>.

2. Firman Allah dalam QS At-Tbah/9:103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا ... ﴿١٠٣﴾

Terjemahnya :

“Ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan menyucikan mereka....”<sup>10</sup>

3. Firman Allah Swt dalam QS Al-Baqarah/2:43

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿٤٣﴾

Terjemahnya :

“Dan laksanakanlah shalat, tunaikanlah zakat dan rukuklah beserta orang yang rukuk”<sup>11</sup>

<sup>9</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, h.575

<sup>10</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h.237

<sup>11</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h.8

Selain dari Al-Qur'an, zakat juga disebutkan dalam hadist Rasulullah saw, sebagai berikut:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : ( أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مُعَاذًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى الْيَمَنِ ) فَذَكَرَ الْحَدِيثَ، وَ فِيهِ : ( أَنَّ اللَّهَ قَدْ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ، تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ، فَتُرَدُّ فِي فُقَرَائِهِمْ ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ

Terjemahnya:

Dari Ibnu Abbas ra. bahwa Nabi Saw mengutus Mu'az ke negeri Yaman ia meneruskan hadis itu dan didalamnya (beliau bersabda): "Sesungguhnya Allah telah mewajibkan mereka zakat dari harta mereka yang diambil dari orang-orang fakir diantara mereka." Muttafaq Alaihi dan lafadznya menurut Bukhari.<sup>12</sup>

#### b. Hukum Nasional

Hukum Nasional merupakan hukum modern dengan karakteristiknya. Hukum Nasional adalah hukum tertulis, diwakili oleh personel yang profesional di bidangnya, didukung oleh kekuasaan yang monopolistik yang mengatur, dan tidak ada kekuasaan politik lain yang menandinginya.<sup>13</sup> Pada kenyataannya adalah kini ummat Islam telah memiliki peraturan perundang-undangan dalam hukum nasional yang terkait dengan hukum Islam.<sup>14</sup> Kemudian Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur tentang zakat di Indonesia:

<sup>12</sup> Imam Bukhari, *AtTajrid Ash Sharih*, terj. Zaenuddin Ahmad Azzubaidi, "Hadits Shahih Bukhari", (Semarang: C.V. Toha Putra, 1986), h. 479

<sup>13</sup> Ahkam Jayadi, *Membuka Tabir Kesadaran Hukum*, Jurisprudentie 4, no.2 (2017), h. 13

<sup>14</sup> Darussalam Syamsuddin, *Transformasi Hukum Islam di Indonesia*, Al-Qadau 2, no. 1 (2015), h. 12

- a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat
- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat
- c. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif
- d. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Badan Amil Zakat Nasional, Badan Amil Zakat Nasional Provinsi, dan Badan Amil Zakat Nasional kabupaten dan kota
- e. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat.

#### **4. Syarat Wajib dan Sahnya Zakat**

Zakat dapat dikeluarkan dan diwajibkan untuk dilaksanakan ketika telah memenuhi persyaratannya. Yang artinya tidak semua orang dikenakan kewajiban untuk berzakat. Ketika orang-orang yang dalam kehidupannya berada dalam kesulitan dan kurang dari segi kepemilikan harta benda, maka dirinya tidak dikenakan kewajiban untuk berzakat khususnya dalam mengeluarkan zakat mal atau zakat harta. Maka dari itu zakat bisa dikatakan sebagai simbiosis mutualisme, yang artinya orang yang mengeluarkannya akan membersihkan hartanya dari yang bukan hak-haknya

dan orang yang menerimanya akan merasa sangat terbantu dari segi materi dan kepemilikan harta benda.

Zakat mempunyai syarat-syarat tertentu yaitu syarat wajib dan syarat sah. Menurut kesepakatan para ulama, syarat wajib zakat ialah merdeka, muslim, baligh, pemilik penuh harta, mencapai nisab dan mencukupi haulnya. Manakala syarat sah zakat pula ialah niat menyertai pelaksanaan zakat tersebut.<sup>15</sup>

a. Syarat Wajib Zakat

Zakat yang dikeluarkan mempunyai syarat-syarat wajib di antaranya yaitu:

1. Merdeka; zakat tidak diwajibkan bagi budak karena budak tidak memiliki apa-apa, dan tuannyalah yang meiliki segala sesuatu yang ada ditangan budak tersebut, karena zakat hanya diwajibkan pada harta yang dimiliki secara sempurna.<sup>16</sup>
2. Islam; tidak ada kewajiban zakat atas orang kafir berdasarkan ijma' ulama. Sebab zakat adalah ibadah menyucikan. Sedangkan orang kafir bukanlah termasuk ahli menyucikan.<sup>17</sup>
3. Baligh; Baligh disebut juga dewasa. Arti dewasa disini mempunyai makna bahwa seseorang itu dapat dikenal hukum. Ciri-ciri orang yang disebut dewasa dapat dilihat dari berbagai macam segi

---

<sup>15</sup>Mohammad Uda Kasim, *Zakat Teori, Kutipan dan Agihan*, (Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2009), h. 67.

<sup>16</sup>Firman Setiawan, *Panduan Pelaksanaan Zakat Hasil Tambak Garam*, (Jawa Timur: Duta Media Publishing, 2019), h. 12.

<sup>17</sup>Buhaerah, *Menyikapi Pemilu Berkeadaban: Wujudkan Demokrasi Yang “Melebihi Warekkadanna, Makkeadan Ampena” (Sopan Dalam Bertutun Santun Dalam Berperilaku)*, (Pare-Pare: IAIN Pare-Pare, 2019), h. 94.

diantaranya yaitu, *pertama*; mengalami haid untuk pertama kalinya bagi perempuan. *Kedua*; Mimpi mengeluarkan mani. Dan yang *ketiga*; Mimpi bersetubuh.<sup>18</sup>

4. Pemilik penuh harta; artinya bahwa harta itu sepenuhnya berada dalam kekuasaan yang punya, baik kekuasaan pemanfaatan maupun kekuasaan menikmati hasilnya, dan tidak tersangkut di dalam hak orang lain. Harta tersebut harus didapatkan dengan baik dan halal, artinya harta yang haram, baik substansi bendanya atau cara mendapatkannya, jelas tidak dikenakan kewajiban zakat. Harta itu diperoleh melalui proses pemilikan halal, seperti warisan, hibah, dan cara-cara lain yang sah.<sup>19</sup>
5. Mencapai Nishab dan Haulnya; Nishab adalah batas minimal harta yang dimiliki seseorang sehingga menjadikannya wajib berzakat. Nishab dihitung dari harta yang melebihi kebutuhan pokok sandang, pangan, papan (makanan, pakaian, dan perumahan) dan kendaraan serta peralatan untuk keperluan pekerjaannya. Adapun haul adalah cukup waktu satu tahun bagi kepemilikan harta kekayaan sebagai batas kewajiban membayar zakat.<sup>20</sup>

---

<sup>18</sup>M. Khalilurrahman al-Mahfani, *Buku Pintar Shalat, Pedoman Shalat Lengkap Menuju Shalat Khusyuk* (Jakarta Selatan: KawahMedia, 2008), h. 65.

<sup>19</sup>Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: PT Grasindo, 2006), h.16.

<sup>20</sup>Annisa Nurhidayati, *Fikih untuk kelas VIII MTs/ Hasbiyallah*, (Bandung: Grafindo Media Pratama, 2006), h.39.



Jadi, ketika telah terpenuhi semua persyaratan diatas maka orang tersebut telah dikenakan kewajiban untuk membayar zakat. Maka tidak ada alasan bagi orang itu untuk tidak mengeluarkannya dan dosa baginya ketika ia enggan mengeluarkannya.

#### b. Syarat Sah Zakat

Selain syarat wajib, zakat juga memiliki syarat sah yang harus terpenuhi diantaranya sebagai berikut:<sup>21</sup>

1. Berniat disertai perealisasiian penyaluran zakat tersebut;
2. Ditunaikan pada waktunya, yakni mulai malam pertam bulan suci ramadhan hingga menjelang pelaksanaan sholat id, kecuali untuk zakat maal hasil tanaman dan pertanian, maka waktunya ditunaikan saat panen, saat menemukan dan saat menambang dengan syarat ketiganya telah mencapai nishab dari harta tersebut.

Para *fuqaha* berbeda pendapat dalam mengajukan syarat-syarat wajib zakat untuk barang perdagangan. Menurut mazhab Hanafi ada empat syarat, Mazhab Maliki ada lima syarat, enam syarat menurut mazhab Syafi'i dan hanya dua syarat menurut mazhab hambali. Diantara syarat-syarat tersebut, diantaranya ada tiga syarat yang disepakati, antara lain: nishab, haul dan adanya niat melakukan perdagangan. Sedangkan syarat-syarat lainnya merupakan tambahan dalam setiap mazhab.<sup>22</sup>

Dengan demikian zakat baru bisa dikeluarkan oleh seseorang dan dikenakan kewajiban berzakat kepadanya ketika telah memenuhi syarat-syarat di atas dan tidak

---

<sup>21</sup>Ainul Yaqin, *Fiqh Ibadah Kajian Komprehensif Tata Cara Ritual dalam Islam*, (Jawa Timur: Duta Media Publishing, 2016), h. 116.

<sup>22</sup>Ashima Faidati, *Pendistribusian Zakat Perdagangan Telur Ayam Petelur*, *Ahkam*, 06, no. 01 (2018), h. 188-189.

kurang dari padanya. Apabila ada syarat yang tidak terpenuhi baik syarat wajib maupun syarat sahnya maka tidak ada kewajiban berzakat baginya.

## 5. Macam-Macam Zakat

Adapun untuk macam-macam zakat yang ada di Indonesia, telah diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat pada Bab I Ketentuan Umum pasal 4, yakni zakat maal dan zakat fitrah.<sup>23</sup> Adapun yang dimaksud zakat maal yaitu mengeluarkan sebagian harta kekayaan yang bersumber dari harta berupa emas, perak, dan logam mulia lainnya; uang dan surat berharga lainnya; perniagaan; pertanian, perkebunan dan kehutanan; peternakan dan perikanan; pertambangan; perindustrian; pendapatan dan jasa; dan rikaz., Sedangkan yang dimaksud zakat fitrah yaitu zakat yang dikeluarkan pada bulan ramadhan oleh setiap umat muslim baik itu anak-anak maupun orang dewasa.

Berdasarkan macam-macam zakat diatas, zakat Fitrah sendiri menurut kesepakatan para ulama bahwa yang dikeluarkan adalah makanan pokok yang dimakan penduduk setempat. Meskipun dalam hal ini kalangan al-Hanafiyyah menyendiri dari mazhab jumhur dimana mereka membolehkan membayar zakat fitrah dengan uang senilai bahan makanan pokok yang wajib dibayarkan.<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup>Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, “Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat,” dikutip dalam Mardani, *Islam: Kumpulan Peraturan Tentang Hukum Islam di Indonesia*, Cet 2; (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2015), h.512

<sup>24</sup>Isnan Ansory, *10 Perbedaan antara Zaakat Maal dan Zakat Fithri*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2020) h. 15.

Sedangkan zakat maal adalah zakat terhadap segala jenis harta benda<sup>25</sup>, maksudnya membersihkan harta yang kita miliki dengan cara memberikannya kepada mustahiq (yang berhak). Hukumnya *Fardhu'ain*. Perintah mengeluarkan zakat maal sama saja dengan perintah mengeluarkan zakat fitrah.<sup>26</sup>

Hal-hal yang wajib dikeluarkan zakatnya itu ada lima macam yakni *Pertama*; hewan ternak yaitu meliputi unta, sapi dan kambing. Adapun dengan adanya pengikat kata “ternak”, maka tidak wajib di zakati hewan-hewan yang tidak dternak (liar) dan terlahir di hutan, pegunungan atau tempat lainnya. *Kedua*; emas dan perak, meskipun belum dibentuk (misalnya emas batangan). *Ketiga*; komoditas perniagaan. *Keempat*; hasil tambang dan hasil bumi. *Kelima*; hasil pertanian dan perkebunan. Selain dari kelima jenis ini, maka tidak wajib untuk dikeluarkan zakatnya.<sup>27</sup>

Adapun penjelasan mengenai kedua jenis zakat tersebut sebagai berikut:<sup>28</sup>

#### **a. Zakat Fitrah**

Zakat ini hukumnya wajib bagi setiap muslim yang memiliki kemampuan untuk menunaikannya. Zakat Fitrah di laksanakan pada bulan suci ramadhan. Maka dari itu zakat Fitrah dan ibadah puasa di bulan suci ramadhan selalu beriringan dan berkaitan. Jenis zakat fitrah yang wajib

---

<sup>25</sup>Abd. Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2017), h. 405.

<sup>26</sup>Tuti Yustiani, *Be Smart Pendidikan Agama Islam*, (Bandung: Grafindo Media Pratama, 2008), h. 56.

<sup>27</sup>Abdurrahman Al-Juzairi, *Al-Fiqh 'Ala Madzahib Al-Arba'ah*, terj. Shofa'u Qolbi Djabir, “Fikih Empat Madzhab Jilid 2”, (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2015), h. 433-434.

<sup>28</sup>Ahmad Hudaifah. dkk, *Sinergi Pengelolaan Zakat di Indonesia*, (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2020), h. 5-6.

dikeluarkan adalah berupa bahan makanan pokok, baik seperti beras, gandum dan jenis makanan pokok yang lainnya yang ada pada suatu daerah.

Ukuran zakat fitrah adalah sekitar 3,5 liter atau 2,5 kg dari jenis makanan seperti gandum, beras, atau kurma dan sejenisnya. Diwajibkan bagi orang yang mampu mengeluarkan zakat untuk dirinya dan bagi orang-orang yang menjadi tanggungannya, seperti istri dan anak-anaknya termasuk disunnahkan juga bagi janin yang masih di dalam kandungan ibunya. Besar kewajiban zakatnya adalah sekitar 3,5 liter atau 2,5 kg per orang.

#### **b. Zakat Maal**

Zakat Maal yang dikenakan disini adalah zakat kekayaan yang harus dikeluarkan dalam jangka waktu satu tahun sekali yang sudah memenuhi nishab yang memenuhi nishab meliputi zakat hasil ternak, harta temuan, emas dan perak, serta hasil kerja (profesi). Masing-masing jenis memiliki perhitungannya sendiri.<sup>29</sup>

Harta benda yang wajib dikeluarkan zakatnya yakni:<sup>30</sup>

##### **1. Emas dan Perak**

Zakat emas dan perak adalah zakat yang dikenakan karena telah mencapai nishab dan haulnya.

- a. Zakat emas wajib dikenakan atas kepemilikan emas yang telah mencapai nishab 85 gram emas. Kadar zakat atas emas sebesar 2,5%. Dalam hal emas yang dimiliki muzakki melebihi nishab, zakat yang harus dibayar sebesar 2,5% dari emas yang dimiliki.

---

<sup>29</sup> Ahmad Hudaifah. Dkk, *Sinergi Pengelolaan Zakat di Indonesia*, h. 6

<sup>30</sup> Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan syariah*, (Jakarta: Kencana, 2018), h. 434

- b. Zakat perak wajib dikenakan atas kepemilikan perak yang telah mencapai nishab 595 gram perak. Kadar zakat atas perak sebesar 2,5%. Dalam hal ini yang dimiliki muzakki nishab, zakat yang harus dibayar sebesar 2,5% dari perak yang dimiliki.

## 2. Pertanian dan perkebunan

Zakat ini dikenakan pada saat panen dengan syarat dapat disimpan. Nishab pertanian adalah sebesar 5 wasaq atau sebanyak 653 kg, dimana 1 wasaq = 60 sha' = 2,175 kg x 60. Pengenaan atau tarif zakat tergantung penggunaan irigasi. Jika menggunakan air hujan/tadah hujan sebesar 10% dan 5% untuk yang menggunakan air irigasi. Jika setengah tahun menggunakan irigasi dan setengah tahunnya lagi tanpa irigasi/air hujan, maka zakatnya adalah 7,5%.<sup>31</sup>

Perbedaan antara air hujan dan irigasi terkait dengan pengeluaran untuk pembiayaan pengadaan air, sehingga dalam konteks pertanian modern dewasa ini, dapat dianalogikan bahwa tanaman yang dibudidayakan dengan menggunakan pupuk maka besar zakatnya adalah 5%.

Apabila hasil tanaman tersebut diperoleh dari tanah sewaan, maka atas pendapatan sewa dikenakan zakat digabungkan dengan harta kekayaan pemilik tanah lainnya dengan nishab emas dan memenuhi satu haul. Apabila tanah didayagunakan menggunakan akad/ kontrak muzara'ah atau muzaqat ( kerja sama pemilik tanah dengan petani yang

---

<sup>31</sup>Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, h. 434

menanam dengan persetujuan bagi hasil) maka kewajiban zakat pertanian ditanggung oleh pemilik dan penggarap sesuai perolehannya masing-masing. Hal ini sesuai dengan prinsip keadilan dan perimbangan hasil.<sup>32</sup>

### 3. Hewan ternak

Hewan ternak bisa dizakatkan ketika telah memenuhi syarat diantaranya mencapai nishab dan haulnya. Adapun hewan ternak yang dimaksud yaitu:<sup>33</sup>

#### a. Unta

Unta tidak wajib dikeluarkan zakatnya, jika telah mencapai lima ekor. Jika jumlah unta telah mencapai lima ekor dan dia digembalakan serta telah mencapai satu tahun (haul), maka wajib dikeluarkan zakatnya sebanyak satu ekor kambing. Jika mencapai sepuluh ekor unta, maka wajib dikeluarkannya zakatnya dua ekor kambing. Demikian seterusnya, setiap bertambah lima, bertambah pula zakatnya sebanyak satu ekor kambing, dengan ketentuan:

1. Jika jumlah unta telah mencapai 25 ekor, maka zakatnya adalah satu unta *bintu makhadh* (betina yang berumur satu tahun dan masuk tahun kedua) atau *ibnu labun* (unta jantan yang umurnya dua tahun dan masuk dalam tahun ketiga).

---

<sup>32</sup>Sri Nurhayati, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, (Jakarta Selatan: Salemba Empat, 2019), h 265-266.

<sup>33</sup>Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan syariah*, h. 435.

2. Jika jumlah unta telah mencapai 36 ekor, maka zakatnya adalah *bintu labun* (unta betina yang umurnya dua tahun dan masuk dalam tahun ketiga).
  3. Jika jumlah unta mencapai 46 ekor, maka zakatnya adalah *huqqah* (satu ekor unta yang umurnya tiga tahun dan masuk dalam tahun keempat).
  4. Jika jumlah unta mencapai 61 ekor, maka zakatnya adalah *jadz'ah* (unta yang umurnya empat tahun dan masuk tahun kelima).
  5. Jika jumlah unta mencapai 76 ekor, maka zakatnya adalah dua ekor *bintu labun*.
  6. Jika jumlah unta mencapai 91 ekor sampai 120 ekor, maka zakatnya adalah dua *huqqah*. Jika jumlahnya masih bertambah, maka setiap empat puluh ekor zakatnya adalah *bintu labun*. Dan setiap lima puluh ekor zakatnya adalah *huqqah*.
- b. Sapi

Hewan sapi tidak wajib dikeluarkan zakatnya, kecuali telah mencapai tiga puluh ekor, mendapatkan makanannya dengan cara digembalakan dan mencapai satu tahun. Jika sapi telah memenuhi kriteria tersebut, maka wajib dikeluarkan zakatnya satu ekor *tabi'* atau *tabi'ah* (sapi jantan atau betina yang umurnya satu tahun, dengan ketentuan:<sup>34</sup>

---

<sup>34</sup>Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan syariah*, h. 436.

1. Jika jumlah sapi mencapai empat puluh ekor, maka zakatnya adalah satu *musinnah* (sapi betina yang umurnya dua tahun). Jika jumlah sapi telah mencapai enam puluh ekor, maka zakatnya adalah dua *tabi'*. Jika jumlah sapi telah mencapai tujuh puluh ekor, maka zakatnya adalah *musinnah* dan *tabi'*. Jika jumlahnya telah mencapai delapan puluh ekor, maka zakatnya adalah dua *musinnah*. Jika jumlahnya telah mencapai sembilan puluh ekor, maka zakatnya adalah tiga *tabi'*. Jika jumlahnya telah mencapai seratus ekor, maka zakatnya adalah *musinnah* dan dua *tabi'*. Jika jumlahnya telah mencapai seratus sepuluh ekor, maka zakatnya adalah dua *musinnah* dan satu *tabi'*. Jika jumlahnya mencapai seratus dua puluh ekor, maka zakatnya adalah tiga *musinnah* dan empat *tabi'*. Demikian seterusnya, setiap tiga puluh ekor sapi zakatnya satu ekor *tabi'* dan setiap empat puluh ekor sapi zakatnya adalah satu *musinnah*.<sup>35</sup>

c. Kambing

Kambing tidak ada zakatnya, kecuali telah mencapai empat puluh ekor. Apabila jumlahnya telah mencapai empat puluh ekor dan haul, zakatnya adalah satu ekor kambing. Apabila jumlahnya telah mencapai 121 ekor kambing, zakatnya adalah dua ekor

---

<sup>35</sup>Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, h. 436



kambing. Apabila jumlahnya telah mencapai 201 sampai 300, zakatnya adalah tiga kambing. Setiap bertambah seratus setelah itu, zakatnya bertambah satu ekor kambing.<sup>36</sup>

#### d. Profesi

Zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan oleh orang yang berprofesi atau memiliki pekerjaan memperoleh hasil dari apa yang dikerjakannya. Dengan syarat, penghasilan tersebut telah mencukupi kebutuhan pokok hidupnya baik sandang, pangan dan papan serta terbebas dari segala hutang-piutang, telah mencapai satu tahun kepemilikan dan nisabnya. Dan zakat profesi ini bisa dibilang baru muncul maka ketentuan hukumnya pun belum ada. Maka dari itu nisabnya pun perlu dikhiaskan ke zakat zakat yang lain yang sudah ditentukan hukumnya.<sup>37</sup>

Hukum Islam di Indonesia merespon dengan baik persoalan zakat profesi tersebut. Hal ini dibuktikan dengan lahirnya fatwa ulama yang dalam hal ini Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengenai wajibnya untuk mengeluarkan zakat profesi.<sup>38</sup> Karena profesi ini sendiri bermacam-macam bentuk, jenis dan perolehan uangnya, maka cenderung untuk tetap memakai kedua macam

---

<sup>36</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunah*, terj. Mahyuddin Syaf, "Fikih Sunnah Jilid 2", (Jakarta: Pustaka Abdi Bangsa, 2017), h.118-121.

<sup>37</sup>Agus Marimin & Tira Nur Fitria, *Zakat Profesi (Zakat Penghasilan Menurut Hukum Islam, Jurnal ilmiah Ekonomi Islam* 01, no. 01 (2015), h. 57

<sup>38</sup> A. Intan Cahyani, *Zakat Profesi Dalam Era Kontemporer*, *El-Iqtishady* 2, no. 2 (2020), h. 173

standar nishab zakat tersebut dalam menentukan nishab zakat profesi, dengan pertimbangan sebagai berikut:<sup>39</sup>

1. untuk jenis-jenis profesi berupa bayaran dan keahlian, seperti dokter spesialis akuntan, advokat, kontraktor, arsitek, dan profesi-profesi yang sejenis dengan itu termasuk juga pejabat tinggi negara, guru besar, dan yang sejajar dengannya, nishab zakatnya disamakan dengan hasil pertanian, yakni senilai kurang lebih 750 kg beras 5 (wasaq). Meskipun kelihatannya pekerjaan tersebut bukan usaha yang memakai modal, namun ia sebenarnya tetap memakai modal, yaitu untuk peralatan kerja, transportasi, sarana komunikasi seperti telepon, rekening listrik dan lain-lain, zakatnya diikaskan atau disamakan dengan zakat hasil pertanian yang memakai modal, yakni 5%, dan dikeluarkan ketika menerima bayaran tersebut. Ini sama dengan zakat pertanian yang menggunakan biaya irigasi (bukan tadah hujan). Dengan demikian, jika harga beras 1 kg Rp. 3200, sedangkan nishab (batas minimal wajib zakat) tanaman adalah 750 kg, maka untuk penghasilan yang mencapai  $\text{Rp. } 3200 \times 750 = \text{Rp. } 2.400.000$ , wajib mengeluarkan zakatnya sebanyak 5% nya yakni Rp. 120.000,.

---

<sup>39</sup>Agus Marimin & Tira Nur Fitria, *Zakat Profesi (Zakat Penghasilan Menurut Hukum Islam*, h. 59.

2. bagi kalangan profesional yang bekerja di pemerintah misalnya, atau badan swasta yang gajinya tidak mencapai nisab pertanian sebagaimana yang dikemukakan diatas, sebutlah guru misalnya, atau dokter yang bekerja dirumah sakit, atau orang-orang yang bekerja diperusahaan angkutan. Zakat disamakan dengan zakat emas dan perak yakni 93,6 gram (sekitar Rp. 8.424.000., jika diperkirakan harga per gram emas sekarang Rp. 90.000), maka nilai nishab emas adalah Rp. 8.424.000., dengan kadar zakat 2,5%. Jika pada akhir tahun jumlah mencapai satu nishab, dikeluarkan zakatnya 2,5%, setelah dikeluarkan biaya pokok dari yang bersangkutan dan keluarganya.<sup>40</sup>

e. Perdagangan

Zakat perdagangan adalah zakat yang wajib dikeluarkan dari hasil perdagangan yang telah mencapai nishab atau haulnya termasuk barang-barang yang digunakan untuk perdagangan dari semua jenis seperti emas, perak, peralatan, pakaian dan lain sebagainya.<sup>41</sup>

Setiap orang islam yang menjalankan aktivitas perdagangan baik secara perseorangan, perkongsian yang menjalankan usaha-usaha pertimbangan, pembalakan, perkilangan, pertukaran,

---

<sup>40</sup>Agus Marimin & Tira Nur Fitria, *Zakat Profesi (Zakat Penghasilan Menurut Hukum Islam*, h. 59.

<sup>41</sup>Munawwar Badruddin & Norhafizah Binti Abdul Razak, *Reorientasi Tentang Zakat Perniagaan: Pengalaman Malaysia, Media Syariah* 08, no. 02 (2011), h. 236.

pemborongan, pengangkutan, perumahan dan usaha kelontongan dimasukkan kedalam usaha yang wajib dikeluarkan zakatnya jika terbukti syarat-syarat cukup nishab dan haulnya. Presentase zakat perdagangan berdasarkan kepada jumlah zakat emas dan perak adalah 2,55 (  $1/40 \times$  harta kekayaan) daripada pendapatan bersih.

Pada syarikat atau perusahaan secara perkongsian (*syirkah*), jika orang yang bersyirkah semuanya beragama islam, maka zakat dikeluarkan terlebih dahulu sebelum dibagikan kepada pihak-pihak yang berkongsi. Tetaopi apabila orang-orang yang terlibat dalam perkongsian terdapat non-muslim, maka zakat hanya dikeluarkan oleh orang yng muslim saja jika jumlahnya telah melebihi nishab.<sup>42</sup>

## 6. Golongan Yang Berhak Menerima Zakat

Orang-orang atau golongan yang berhak menerima zakat telah diatur dalam ajaran agama Islam, yakni ada delapan golongan (*asnaf*). Ketentuan ini diatur dalam Al-Qur'an surat At-Taubah, 9:60. Syariat Islam adalah bersifat universal, artinya ketentuan-ketentuannya bersifat umum, dapat diterapkan dalam situasi dan kondisi yang berbeda-beda. Disini tergantung pada kemampuan kita untuk menafsirkan ajaran itu sesuai dengan situasi yang ada.

Delapan golongan (*asnaf*) yang berhak menerima zakat seperti diatur dalam surat At-Taubah, 9:60 adalah sebagai berikut:<sup>43</sup>

---

<sup>42</sup>Munawwar Badruddin & Norhafizah Binti Abdul Razak, *Reorientasi Tentang Zakat Perniagaan: Pengalaman Malaysia, Media Syariah* h. 236.

<sup>43</sup>Syukri Ghozali. Dkk, *Pedoman Zakat 9 seri*, (Jakarta: Proyek Peningkatan Sarana Keagamaan Islam, Zakat dan Wakaf, 2001), h.326

- a. *Fakir*, yaitu orang tidak berharta dan tidak mempunyai pekerjaan atau usaha tetap, guna mencukupi kebutuhan hidupnya (nafkah), sedang orang yang menanggungnya (menjamin) tidak ada.
- b. *Miskin*, orang yang tidak mampu mencukupi kebutuhan hidupnya, walaupun mempunyai pekerjaan tetapi pekerjaannya itu tidak mampu mencukupi kebutuhan hidupnya, dan tidak ada orang yang menanggungnya.
- c. *Amil*, yaitu orang atau panitia/organisasi yang mengurus zakat baik mengumpulkan, membagi atau mengelolanya.
- d. *Muallaf*, orang yang baru memeluk agama islam tetapi masih terbata-bata akan pemahaman islam.
- e. *Riqab*, yang mempunyai perjanjian akan dimerdekakan oleh majikannya dengan jalan menebus dengan uang.
- f. *Gharim*, yaitu suatu usaha memperkenalkan syiar-syiar agama islam
- g. *Ibnu Sabil*, yaitu orang-orang yang kehabisan bekal dalam berpergian dengan maksud baik.

## 7. Tujuan Zakat

Zakat yang merupakan kewajiban umat muslim bertujuan sebagai pengokohan agama Islam itu sendiri. Didalam zakat terkandung nilai-nilai kemanusiaan yang berbudi pekerti luhur yang dimana ketika umat muslim memahami dengan baik konsep zakat tersebut, maka tujuan dari zakat ini akan tercapai, dan akan berdampak baik bagi kehidupan masyarakat dari segi individu maupun sosial.

Allah mewajibkan zakat kepada umat islam dengan tujuan yang mulia. Zakat menghilangkan sifat dengki dan benci, Masyarakat dapat mengetahui sesuatu yang

harus dilakukan.<sup>44</sup> Karena sifat ini akan melemahkan produktifitas. Islam tidak memerangi penyakit ini dengan semata-mata nasihat dan petunjuk, akan tetapi mencoba mencabut akarnya melalui mekanisme zakat, dan menggantikannya dengan persaudaraan yang saling memperhatikan satu sama lain.<sup>45</sup>

Menurut Labib dan Moh.Ridhoi di dalam bukunya *“Kuliah Ibadah Ditinjau dari Segi Hukum dan Maknanya”* ada beberapa tujuan zakat yaitu:<sup>46</sup>

- a. Zakat menyucikan jiwa dari sifat kikir. Zakat yang dikeluarkan si muslim, semata karena menurut perintah Allah dan mencari Ridho-Nya, akan menyucikan dari segala kotoran dosa secara umum dan kotorannya sifat kikir.
- b. Zakat mendidik berinfak dan memberi. Sebagaimana halnya zakat menyucikan jiwa si muslim dari sifat kikir, ia pun mendidik agar simuslim mempunyai rasa ingin memberi, menyerahkan dan berinfak.
- c. Berakhlak dengan akhlak Allah. Manusia apabila sudah suci dari kikir dan bathil, dan sudah siap untuk memberi dan berinfak, akan naiklah ia dari kekotoran sifat kikirnya. Dan dia hampir mendekati kesempurnaan sifat Tuhan, karena salah satu sifatnya adalah memberi kebaikan, rahmat, kasih sayang dan kebijakan, tanpa ada kemanfaatan yang kembali kepada-Nya.

---

<sup>44</sup> Abdi Wijaya, *Respon Lembaga Fatwa Terhadap Isu Fikih Kontemporer (Studi Komparatif Lembaga Fatwa MUI, Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Bahtsul Matsail NU)*, Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab 1, no. 2 (2019), h. 314

<sup>45</sup>Yoghi Citra Pratama, *Peran Zakat Dalam Penanggulangan Kemiskinan*, *The Jurnal of Tauhidinomics* 01, no. 01 (2015), h. 94.

<sup>46</sup>Labib dan Moh. Ridhoi, *Kuliah Ibadah Ditinjau dari Segi Hukum dan Maknanya*, dalam Qodariah Barkah dkk, *Fikih Zakat, Sedekah dan Wakaf*, cet.1, (Jakarta: Kencana,2020). h. 47-48.

- d. Zakat merupakan manifestasi syukur atas nikmat Allah. Zakat akan membangkitkan bagi orang yang mengeluarkannya makna syukur kepada Allah, pengakuan akan keutamaan dan kebbaikanny, karena sesungguhnya Allah, sebagaimana dikemukakan oleh Al-Gazali, senantiasa mmemberikan nikmat kepada hambanya, baik yang berhubungan dengan diri maupun hartanya.
- e. Zakat mengobati hati dari cinta dunia. Zakat dari segi lain, merupakan suatu peringatan terhadap hatsi akan kewajiban kepada Tuhan-Nya dan kepada akhirat serta merupakan obat, agar hati jangan tenggelam kepada kecintaan akan harta dan kepada dunia secara berlebih-lebihan. Karena sesungguhnya tenggelam kepada kecintaan dunia, sebagaimana dikemukakan oleh Ar-Razi, dapat memalingkan jiwa dari kecintaan kepada Allah dan ketakutan kepada akhirat.<sup>47</sup>

Tujuan zakat dapat dilihat dari bidang moral, sosial dan ekonomi. Dalam bidang moral, zakat dan ketamaman dan keserakahan si kaya. Sesudsh kekayaan itu disisihkan untuk kesejahteraan masyarakat. Dalam bidang sosial, zakat bertindak sebagai alat khas yang diberikan islam untuk menghapuskan kemiskinan dari masyarakat dengan menyadarkan sikaya akan tanggung jawab yang mereka miiki. Dalam ekonomi, zakat mencegah penumpukan kekayaan yang mengerikan dalam tangan segelintir orang dan memungkinkan kekayaan untuk disebarakan sebelum

---

<sup>47</sup>Labib dan Moh. Ridhoi, *Kuliah Ibadah Ditinjau dari Segi Hukum dan Maknanya*, dalam Qodariah Barkah dkk, *Fikih Zakat, Sedekah dan Wakaf*, h. 47-48.

sempat menjadi besar dan sangar berbahaya di tangan para pemiliknya. Ia merupakan sumbangan wajib kaum muslimin untuk perbendaharaan negara.<sup>48</sup>

## 8. Hikmah Zakat

Pada hakikatnya semua yang ada di alam semesta diciptakan oleh Allah SWT. adalah untuk kehidupan umat manusia. Tetapi Allah menetapkan setiap manusia yang lahir di dunia mempunyai keadaan yang berbeda-beda. Ada yang dianugerahkan Allah harta benda yang berlimpah dan ada juga yang memiliki harta benda yang jauh dari kata cukup. Oleh karena itu zakat menjadi solusi ditengah pembeda itu untuk orang-orang saling membantu, memberi dan tolong menolong sehingga terciptalah keseimbangan antara manusia satu dengan yang lainnya didalam kehidupannya khususnya dari segi harta benda.

Bagi orang mukmin, dia akan senantiasa untuk menghilangkan rasa kikir dan bathil di dalam hatinya. Dikarenakan sifat kikir adalah sifat yang sangat berbahaya. Selain dapat mengganggu kedamaian hati dan ketenteraman hidup, sifat ini pun dapat membawa manusia bahkan berani untuk menjual agama dan bisa saja mereka mengkhianati negaranya. Maka dari itu, Allah SWT. memberikan perintah untuk berzakat dan sebisa mungkin membiasakan diri untuk bersedekah.

Menurut Wahbah al-Zuhayli paling tidak ada empat perkara penting dari hikmah pensyari'atan zakat, yang dapat disimpulkan sebagai berikut:<sup>49</sup>

---

<sup>48</sup>Mardani, *Aspek Hukum Lembaga keuangan Syariah di Indonesia*, cet.2, (Jakarta: Kencana, 2015), h. 254.

<sup>49</sup>Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Islam wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk, "Fikih Islam dan Dalilnya", (Jakarta: Gema Insani, 2011) dikutip dalam Fuadi, *Zakat dalam Sistem Hukum Pemerintahan Aceh*, cet.1, (Yogyakarta: Deepublish, 2016), h. 20-21.



- a. Zakat dapat menjaga harta dan pandangan dari serobotan orang-orang jahat.
- b. Zakat merupakan bantuan orang-orang fakir dan orang-orang yang memerlukan bantuan. Pemberian Zakat kepada mustahik mendorong mereka untuk bekerja jika mereka kuat dan mempertingkatkan taraf hidup yang layak.
- c. Zakat dapat membersihkan jiwa-jiwa manusia dari sifat-sifat kikir dan tamak serta melatih mukmin menjadi dermawan dan murah hati. Dengan demikian mereka rela berderma pada kebaikan dan kemakmuran bersama serta beramal sosial.

Memperingatkan manusia untuk berterima kasih kepada nikmat harta yang diterimanya. Orang-orang yang tidak pernah mengeluarkan zakat akan membuat diri mereka angkuh dan sombong karena menganggap harta itu semata-mata datang dari usaha dan kerja keras mereka sendiri tanpa ada bantuan orang lain. Apalagi jika dibarengi dengan pengetahuan ekonomi islami yang dilandasi nilai-nilai dasar agama yang menjunjung tinggi keadilan dan kejujuran.<sup>50</sup>

Perumpamaan zakat seperti perumpamaan orang yang belajar ilmu dan selalu mempelajari lalu dia mengerjakannya, maka sesungguhnya orang tersebut akan selalu ingat dan memorinya penuh dengan ilmu. Jika dia meninggalkannya dan sibuk dengan senda gurau, perkataan kosong, dan perkataan kotor niscaya ilmunya sedikit

---

<sup>50</sup> Sohrah, *Aktualisasi Konsep Ekonomi Adil Menurut Al-Qur'an*, El-Iqtishady 2, no. 1 (2020), h. 162

demis sedikit akan hilang dari memorinya. Sehingga dia akan melupakan nikmat besar dan perhiasan agung.<sup>51</sup>

Ada tiga hikmah atau manfaat yang akan diperoleh dari ibadah zakat sebagai berikut:<sup>52</sup>

- a. Mengikis habis sifat-sifat kikir di dalam jiwa seseorang, melatih diri agar memiliki sifat-sifat dermawan, dan mengantarnya mensyukuri nikmat Allah. Pada akhirnya ia dapat mensucikan diri dan mengembangkan kepribadiannya.
- b. Menciptakan ketenangan dan ketenteraman, bukan hanya bagi penerima, melainkan juga bagi pemberi zakat, shadaqoh atau infaq. Kedengkian dan iri hati dapat timbul dari mereka yang hidup dalam kemiskinan, pada saat melihat orang yang berkelebihan tidak mengulurkan bantuan kepada mereka.
- c. Mengembangkan harta benda. Allah mewajibkan zakat bagi setiap muslim sebagai bukti penghambaan dan ketaatan kita dalam menyembah kepada Allah SWT. Ada rasa kepuasan tersendiri ketika telah mengeluarkan zakat. Disini lain hati akan menjadi tentram dan damai. Begitupun sebaliknya, ketika enggan mengeluarkan zakat maka dapat dipastikan orang tersebut tidak akan pernah mendapatkan ketenangan hati.

---

<sup>51</sup>Syekh Ali Ahmad al-Jurjawi, *Hikmatut Tasyri' Wa Falsafatuhu*, terj. Toyib Arifin, "Menyingkap Hikmah Di Balik Perintah Ibadah", (Yogyakarta: Qudsi Media, 2015), h. 172.

<sup>52</sup>Mohammad Asror Yusuf, *Kaya Karena Allah*, (Tangerang: Kawan Pustaka, 2004), h. 35-36.

## ***B. Tinjauan Terhadap Pengentasan Kemiskinan***

Kemiskinan memiliki makna yang bersifat multi-dimensi. Para pakar telah mencoba mendefinisikan kemiskinan dari beragam perspektif, namun definisi yang ideal bagi seluruh negara dan masyarakat di dunia agak sulit ditentukan karena adanya perbedaan karakteristik antar negara dan masyarakat, baik secara demografi, ekonomi, sosial budaya, dan politik<sup>53</sup>

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin, disebutkan dalam Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1, bahwasanya yang dimaksud dengan:<sup>54</sup>

- a. Fakir miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai mata pencaharian, tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya
- b. Penanganan fakir miskin adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah daerah, dan/atau masyarakat dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan pemberdayaan, pendampingan, serta fasilitasi untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara
- c. Kebutuhan dasar adalah kebutuhan pangan, sandang, perumahan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan dan/atau pelayanan sosial

---

<sup>53</sup>Irfan Syauqi Beik, dan Lukman M Baga, "*Menggagas Islamic Poverty dan Strategi Pemberdayaan Dhuafa*", dikutip dalam Rahmatina A. Kasri, dan Arif Haryono, *Bangsa Betah Miskin*, (Jakarta: Indonesia Magnificence of Zakat, 2011), h. 5

<sup>54</sup>Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, "Undang-Undang Republik Indonesia no 13 tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, (Jakarta: Kementerian Sekretariat Negara, 2011), h. 2-3

## 1. Penyebab Kemiskinan

Kemiskinan seringkali dipandang dari berbagai sisi dan diklasifikasikan berdasarkan beragam aspek. Secara umum kemiskinan dapat dilihat dari dua dimensi, yaitu:<sup>55</sup>

- a. Kemiskinan dapat dilihat sebagai proses yang dinamis, kompleks, dan beragam. Kemiskinan dapat disebabkan oleh rendahnya kualitas modal manusia, pendapatan dan konsumsi serta keterbatasan akses terhadap faktor produksi (*asset*) dan tingkat pengembalian (*return*) terhadap faktor-faktor produksi tersebut (tenaga kerja, modal, tanah dan teknologi)
- b. Kemiskinan juga merupakan akibat dan memberikan kontribusi terhadap ketersisihan (*exclution*) atau proses marginalisasi dan proses sosial, politik, dan ekonomi. Bentuk dari proses marginalisasi ini bisa tercermin dari sisi etnik, kelas masyarakat, ataupun gender.

Adapun faktor-faktor yang dapat menyebabkan kemiskinan dilihat dari segi mentalitas dapat pada empat keadaan sebagai berikut:<sup>56</sup>

- a. *Al-Dha'if*, yakni keadaan diri seseorang yang meliputi kelemahan, yakni lemah semangat, lemah akal dan ilmu, lemah fisik dan lemah keterampilan;

---

<sup>55</sup>Agussalim, *Mereduksi Kemiskinan Sebuah Proposal Baru Untuk Indonesia*, (Makassar: Nala Cipta Litera, 2009), h. 19

<sup>56</sup>Asep Usman Ismail, *Al-Qur'an dan Kesejahteraan Sosial*, (Tangerang: Lentera Hati, 2012), h. 10

- b. *Al-Khauf*, yakni keadaan diri seseorang yang diselimuti suasana takut sehingga tidak memiliki keberanian untuk mencoba bekerja, berusaha, berdagang atau menjadi tukang, karena tidak berani mengambil resiko gagal, rugi atau kehilangan modal;
- c. *Kaslan*, yakni keadaan jiwa seseorang yang diliputi oleh kemalasan sehingga kehilangan kesempatan, waktu, dan peluang untuk mengembangkan potensi dirinya dengan optimal;
- d. *Al-Bakhil*, yakni keadaan diri seseorang yang didominasi oleh sifat kikir. Sifat dan karakteristik kebakhilan ini menjadikan diri seseorang hanya bisa menerima, tetapi tidak bisa menyalurkan.

## 2. Upaya-Upaya Dalam Pengentasan Kemiskinan

Al-Qur'an dengan tegas menganalogikan perjuangan untuk mengentaskan kemiskinan itu dengan jalan yang mendaki seperti yang tersurat dalam QS. Al-Balad/90: 12-16

وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ ﴿١٢﴾ فَكُّ رَقَبَةٍ ﴿١٣﴾ أَوْ إِطْعَمٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ ﴿١٤﴾  
يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ ﴿١٥﴾ أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ ﴿١٦﴾

Terjemahnya:

“Tahukah kamu Apakah jalan yang mendaki lagi sukar itu? (yaitu) melepaskan budak dari perbudakan, Atau memberi Makan pada hari kelaparan, (kepada) anak yatim yang ada hubungan kerabat, atau kepada orang miskin yang sangat fakir.”<sup>57</sup>

<sup>57</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 594

Ayat di atas dijelaskan bahwa mengatasi kemiskinan itu merupakan jalan yang mendaki dan sukar, kemiskinan yang menjadi akar masalah sosial itu bersumber dari kualitas sumber daya manusia yang rendah, terutama soal mentalitas.<sup>58</sup>

Mengemukakan tentang upaya pengentasan kemiskinan ada beberapa solusi yang dapat dilakukan, yakni:<sup>59</sup>

- a. Setiap orang islam harus bekerja keras dan meningkatkan etos kerja;
- b. Orang-orang kaya menyantuni dan menjamin kehidupan ekonomi keluarga dekatnya yang miskin;
- c. Meningkatkan dan mengintensifkan pelaksanaan zakat secara professional;
- d. Mengintensifkan pengumpulan bantuan dari sumber, baik dari swadaya masyarakat maupun pemerintah;
- e. Mendorong orang-orang kaya untuk mengeluarkan sedekah kepada orang-orang yang sangat membutuhkannya;
- f. Bantuan-bantuan sukarela dan kebaikan hati secara individual dan insidental.

---

<sup>58</sup>Asep Usman Ismail, *Al-Qur'an dan Kesejahteraan Sosial*, h. 10

<sup>59</sup>Abdurrachman Qadir, *Zakat Dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial*, (Jakarta: Raja Grafindo, 1998), h. 221

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

##### ***A. Jenis dan Lokasi Penelitian***

###### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data “*Kualitatif*” mengingat yang diteliti adalah Pengelolaan Zakat Terhadap Pengentasan Kemiskinan Pada Badan Amil Zakat Nasional Kab. Soppeng. *Kualitatif* adalah suatu data yang diperoleh dengan mengkaji dan menggali fenomena dalam masyarakat sebagai sumber data secara objektif di lapangan tentang peran zakat dalam pengentasan kemiskinan.

###### **2. Lokasi penelitian**

Penentuan lokasi penelitian harus benar-benar diperhitungkan sehingga dapat memperoleh data yang dibutuhkan dan tercapainya tujuan penelitian itu sendiri, penentuan lokasi yaitu di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Soppeng yang merupakan tempat penelitian dilakukan, hal ini di dasarkan atas beberapa pertimbangan antara lain karena biaya, waktu serta letaknya yang begitu strategis dan mudah dijangkau oleh peneliti, selain itu juga karena di daerah tersebut terdapat banyak masyarakat yang masih membutuhkan bantuan dan kesusahan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan ditetapkannya lokasi, maka akan dapat lebih mudah untuk mengetahui dimana tempat suatu penelitian akan dilakukan.

## ***B. Pendekatan Penelitian***

Penelitian ini membahas tentang zakat dalam pengentasan kemiskinan, maka metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan teologis normatif,<sup>1</sup> dan sosio kultural.<sup>2</sup> Penonjolan metode-metode pendekatan seperti yang telah disebutkan, sangat relevan dalam pembahasan tentang peranan zakat dalam pengentasan kemiskinan di Kecamatan Lalabata.

## ***C. Sumber Data***

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :<sup>3</sup>

### **1. Data Primer**

Data primer adalah data-data yang diperoleh langsung dari lapangan melalui proses wawancara terhadap narasumber yang dianggap mengetahui segala informasi yang diperlukan dalam penelitian, yang berupa pengalaman praktek maupun pendapat hukum. Informasi tersebut dapat diperoleh dari :

#### **a. Informan**

informan adalah orang yang ditentukan sebaga sampel dalam penelitian ini dan diharapkan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh peneliti. informan dalam penelitian ini adalah Ketua Baznas Kab. Soppeng. Dari beberapa informan tindakan yang dapat diharapkan

---

<sup>1</sup>Pendekatan teologis normatif, bila objek kajiannya membahas berdasarkan norma-norma keagamaan yang diyakini keberadaannya. Lihat Noeng Muhajir, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, (yogyakarta: Rake Sarasin, 1996), h.107

<sup>2</sup>Pendekatan sosio kultural, bila objek kajiannya berdasarkan ilmu social dan kemasyarakatan, lihat Noeng Muhajir, h.101

<sup>3</sup>Moleong, Lexy. J, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung : PT. Remaja Rosda Karya, 2006), h.112.



dapat terungkap kata-kata atau tindakan orang yang diamati atau diwawancarai merupakan sumber data utama.

b. Responden

Responden adalah pihak-pihak yang dijadikan sample dalam sebuah penelitian atau orang yang memberikan tanggapan atas pertanyaan-pertanyaan situasi dan kondisi latar penelitian. Responden yang dimaksud disini adalah pihak-pihak yang dapat memberikan informasi yang terkait dengan Pengelolaan Zakat Terhadap Pengentasan Kemiskinan Pada Badan Amil Zakat Nasional (BASNAZ) Kab. Soppeng.

2. Data Sekunder

Data Sekunder merupakan data yang dihimpun peneliti dengan cara menelaah bahan-bahan hukum yang dianggap relevan dengan penelitian ini seperti buku, jurnal, artikel, dan penelitian sebelumnya guna sebagai penunjang dari sumber pertama.

**D. Metode Pengumpulan Data**

Untuk mengumpulkan data, dilakukan dengan cara:<sup>4</sup>

1. Observasi adalah kegiatan pengumpulan data penelitian dengan cara melihat langsung objek penelitian yang menjadi fokus penelitian. Observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Pengamatan dan pencatatan yang dilakukan terhadap objek di tempat terjadi atau berlangsungnya peristiwa, sehingga observer berada bersama objek yang diselidiki, disebut observasi langsung.

---

<sup>4</sup>Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, ( Jakarta : Rajagrafindo Persada.2007), h. 214.

2. Wawancara merupakan salah satu pengumpulan data yang dilakukan untuk memperoleh informasi dengan cara berkomunikasi langsung dengan narasumber berdasarkan pertanyaan yang telah disusun secara sistematis. Wawancara bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai Pengelolaan Zakat Terhadap Pengentasan Kemiskinan Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kab. Soppeng.
3. Dokumentasi adalah Hasil dari wawancara dan observasi harus disertai dengan bukti dokumentasi agar penelitian yang dilaksanakan dapat dipercayai pembaca pada umumnya.

#### ***E. Instrumen Penelitian***

Instrumen Penelitian adalah alat-alat yang digunakan untuk proses penemuan jawaban pokok dari sebuah masalah penelitian. Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah catatan dan/atau rekaman untuk menyimpan keterangan dari narasumber atas wawancara yang dilakukan secara langsung di lokasi penelitian.<sup>5</sup>

Adapun instrumen penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut :

1. Peneliti
2. Pedoman Wawancara
3. Alat perekam/Handphone
4. Alat Tulis
5. Informan

---

<sup>5</sup>Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Kencana, 2006), h.68

## ***F. Teknik Pengolahan dan Analisis data***

### **1. Teknik Pengolahan Data**

#### **a. Klasifikasi Data**

Klasifikasi Data adalah proses penyaringan data yang sesuai dengan pokok masalah yang akan dikaji agar dapat tersusun secara sistematis sesuai kaidah yang telah ditetapkan.

#### **b. Reduksi Data**

Reduksi Data adalah proses peninjauan kembali data yang diperoleh untuk menghindari keabstrakan dan untuk lebih memperjelas data-data yang diperoleh dalam penelitian.

#### **c. Editing Data**

Editing Data adalah tahap pemeriksaan setelah proses pengumpulan data oleh peneliti guna mengetahui kesesuaian dari penelitian tersebut.

### **2. Teknik Analisis Data**

Analisis data dilakukan secara induktif, yaitu mulai dari lapangan atau fakta empiris dengan cara terjun ke lapangan, mempelajari, menganalisis, menafsir dan menarik kesimpulan dari fenomena yang ada di lapangan. Analisis data di dalam penelitian kualitatif dilakukan bersamaan dengan proses pengumpulan data.<sup>6</sup>

## ***G. Pengujian Keabsahan Data***

Demi terjaminnya keakuratan dan ketepatan data penelitian, maka peneliti akan melakukan pengujian keabsahan data. Data yang salah akan menghasilkan penarikan kesimpulan yang kurang tepat dan berlaku pula sebaliknya, jika data yang diperoleh akurat, maka akan menghasilkan kesimpulan yang tepat pula.

---

<sup>6</sup>Moleong, Lexy. J, *Metode Penelitian Kualitatif*, h 94.

Dalam menguji keabsahan data yang dihimpun peneliti, maka digunakan teknik triangulasi. Triangulasi merupakan suatu teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data tersebut untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data tersebut.<sup>7</sup>



---

<sup>7</sup>Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006), h. 330.

## **BAB IV**

### **PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN**

#### ***A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian***

##### **1. Gambaran Umum Kabupaten Soppeng**

Kabupaten Soppeng merupakan salah satu bagian dari Provinsi Sulawesi Selatan yang terletak antara 40 06' Lintang Selatan dan 40 32' Lintang Selatan dan antara 1190 47' 18'' Bujur Timur dan 1200 06' 13'' Bujur Timur. Letak Kabupaten Soppeng di depresiasi Sungai Walanae yang terdiri dari daratan dan perbukitan. Dengan luas daratan 700 km<sup>2</sup> berada pada ketinggian rata-rata kurang lebih 60 m di atas permukaan laut. Perbukitan yang luasnya 800 km<sup>2</sup> berada pada ketinggian rata-rata 200 m di atas permukaan laut. Ibukota Kabupaten Soppeng yaitu Kota Watansoppeng berada pada ketinggian 120 m diatas permukaan laut.<sup>1</sup>

Kabupaten Soppeng merupakan salah satu bagian dari provinsi Sulawesi Selatan yang secara administratif dibagi menjadi 8 kecamatan, 21 kelurahan, 49 desa, 39 lingkungan, 124 dusun, 438 rukun kampung, dan 1.163 rukun tetangga dengan batas wilayah:

- a. Sebelah Utara: Kabupaten Sidenreng Rappang dan Kabupaten Wajo
- b. Sebelah Timur: Kabupaten Wajo dan Kabupaten Bone
- c. Sebelah Selatan: Kabupaten Bone
- d. Sebelah Barat: Kabupaten Barru

---

<sup>1</sup> <https://sulselprov.go.id> (diakses 29 Juni 2021)

## **2. Latar Belakang Berdirinya BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasioanl) Kab Soppeng**

BAZNAS merupakan lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional . Lembaga tersebut merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang sifatnya mandiri dan bertanggung jawab terhadap presiden berdasarkan kementrian agama

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) pertama kali disebut dengan nama BAZIS. Selama lembaga ini dibentuk, hanya diatur oleh keputusan Presiden Nomor 07/POIN/10/198 tanggal 31 Oktober 1968 tentang pengelola zakat nasional, yang lembaganya pada saat itu hanya di beberapa daerah saja. Lahirnya Undang-Undang No. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat merupakan awal mula pengelolaan zakat yang berlaku secara Nasional. Sebagai implementasi UU Nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, dibentuklah Badan Amil Zakat Nasioanl (BAZNAS) dengan surat keputusan presiden republik Indonesia Nomor 8 tahun 2011. Dalam surat keputusan tersebut, tugas dan fungsi BAZNAS yaitu untuk melakukan pengumpulan dan pendayagunaan zakat, dalam Undang-undang tersebut terdapat dua jenis organisasi pengelola zakat yaitu badan amil zakat (baz) yang dibentuk pemerintah dan lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk oleh masyarakat dan dilakukan oleh pemerintah.

Pada tanggal 27 Oktober 2011, DPR RI menyetujui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat sebagai pengganti Undang-Undang Nomor

38 Tahun 1999 yang dimana isi dari Undang-Undang tersebut menyebutkan bahwa pengelolaan zakat bertujuan : (1) meningkatkan efektifitas dan efesiensi pelayanan dan pengelolaan zakat, (2) meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulanga kemiskinan.

Berdasarkan kewenangan BAZNAS tersebut maka dibentuklah Badan Amil Zakat Nasional Kabupatetn Soping yang dulunya dikenal dengan BAZDA (Badan Amil Zakat Daerah) yang ditentukan berdasarkan Undang-undang No.38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat yang menjadi landasan dalam mendirikan lembaga zakat tersebut selama berjalannya yang berlangsung beberapa tahun yaang menimbulkan banyak pihak yang merasakan kelemahan dari UU Nomor 38 Tahun 1999 dari beberapa sisi sehingga melakukan revisi UU tersebut. Maka hal tersebut berhasil direvisi pada 25 November 2011 dan telah disahkan UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan Zakat yang baru yang telah melahirkan kemajuan yang cukup signifikan sehingga Di Kabupaten Soppeng mendirikan Pengelolaan Zakat yang sesuai dengan UU tersebut pengelola zakat dalam UU yang baru adalah BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) yang didirikan pada tahun 2015 sesuai dengan pertimbangan pemerintah kabupetn/kota yang disesuaikan berdasarkan UU yang telah ditetpakan oleh pemerintah pusat bersamat dengan Keputusan Kementrian Agama.

Keluarnya UU Zakat ini telah menjadi suatu terobosan yang cukup baik bagi perkembangan pengelolaan zakat khususnya yang ada dikabupaten/kota.<sup>1</sup>

Berikut daerah kerja dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Soppeng adalah sebagai berikut:

**Tabel 1. Daerah Kerja BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Kabupaten Soppeng**

No	Kecamatan	Kelurahan/Desa
1	Lalabata	10
2	Citta	4
3	Donri-Donri	9
4	Ganra	4
5	Liliriaja	8
6	Lilirilau	12
7	Marioriawa	10
8	Maroriwawo	13
	<b>Jumlah</b>	<b>70</b>

### 3. Letak Geografis BAZNAS Kabupaten Soppeng

Lokasi BAZNAS Kabupaten Soppeng terletak di tengah kota kab soppeng, tepatnya Jl. Kemakmuran, Kecamatan Lalabata yang berdekatan dengan Kementrian Agama dan Pengadilan Negeri Kabupaten Soppeng

---

<sup>1</sup> Achmady Tangga,S.Sos, (68 tahun), Komisioner dua BAZNAS kabupaten soppeng bidang pendistribusian dan pemberdayaan, *Wawancara*,Soppeng 27 Mei 2021.



#### 4. Struktur Pengurus BAZNAS Kabupaten Soppeng

- a. Pembina (BUPATI SOPPENG)
- b. Pembina (Ketua DPRD KAB. SOPPENG)
- c. Pembina (Kepala kementrian Agama Kabupaten Soppeng)
- d. Ketua ( DR.H. Sukardi Deppung,MM.)
- e. Wakil Ketua I Bidang Pengumpulan (Drs. H. ABD. Rahman K)
- f. Wakil Ketua II Bidang Penditribusian dan pengumpulan (ACHMADY TANNGA,S.Sos)
- g. Wakil Ketua III Bidang keuangan dan pelaporan (DR. H. DJAMALUDDIN, S.Sos.,M.Pd)
- h. Wakil Ketua IV Bidang Kesekretariatan SDM dan Umum (Drs. H. M. AKIB. SUAIB
- i. Sekertaris (Drs.LATANG,M.Pd.i)
- j. Bagian Keuangan dan pelaporan (NURLAELA. S.E )
- k. Bagian Keuangan (Bendahara) H. MAPPA.S.Sos)
- l. Bagian SDM danUmum (RIDWAN.Amd)
- m. Bagian SDM dan Umum (SAHRUL RAMADHAN.SM)
- n. Kepala Pelaksana dan Bagian pengumpulan (NURHAEDAH.S.Si)
- o. Bagian Pengumpulan (NUR RAHMA.SP.d)
- p. Satuan Pengawas Internal (Drs. KH. ARIFUDDIN JAELANI)

## **5. Visi Misi BAZNAS Kabupaten Soppeng**

### **a. Visi**

Meningkatkan efektivitas, efisiensi pengelolaan dan manfaat zakat, yang transparan dan akuntabel.

### **b. Misi**

1. Dilakukan menurut syariat Islam
2. Dilaksanakan sesuai peraturan sesuai peraturan perundang-undangan
3. Diselenggarakan dengan profesional
4. Meningkatkan semua sumber sumber daya pada UPZ

## **5. Tujuan BAZNAS Kabupaten Soppeng**

Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam rangka menaggulangi kemiskina

## **6. Peraturan-Peraturan Pengelolaan ZIS BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Kabupaten Soppeng**

Peraturan pwngelolaan ZIS Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Soppeng meliputi:

- a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

- c. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 52 Tahun 2014 tentang syarat dan tatacara perhitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif
- d. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja BAZNAS, BAZNAS Propinsi dan BAZNAS Kabupaten/Kota

***B. Mekanisme Pengelolaan Zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)***

***Kabupaten Soppeng***

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat menyebutkan bahwa pengelolaan zakat merupakan bentuk perencanaan, pelaksanaan, dan pengordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Berdasarkan peraturan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Nomor 3 Tahun 2014 BAB III Pasal 28 tentang Organisasi Dan Tata Kerja BAZNAS Kabupaten/Kota, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Soppeng melaksanakan fungsinya dengan berbagai sistem dalam pengelolaan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, di antaranya sebagai berikut:

a. Bidang Ekonomi

Bidang Ekonomi memberikan santunan yang berbentuk bantuan konsumtif yang di keluarkan pada waktu tertentu saja oleh BAZNAS Kabupaten Soppeng. Pada bidang ini juga memberikan bantuan yang

produktif kepada mustahik agar mereka dapat berwirausaha untuk meningkatkan keterampilan yang mereka miliki.

b. Bidang Pendidikan

Program di bidang pendidikan terbagi ke beberapa program yaitu bentuk bantuan peralatan sekolah, juga bantuan berupa kebutuhan pokok untuk pondok pesantren

c. Bidang kemanusiaan

Program bidang kemanusiaan merupakan bantuan dalam bentuk penanganan korban bencana alam, korban kecelakaan, korban penganiayaan dan korban tragedi kemanusiaan lainnya.

d. Bidang kesehatan

Program bidang kesehatan merupakan bantuan dalam bentuk kesehatan dan pembangunan sarana dan prasarana kesehatan.

e. Bidang advokasi dan dakwah

Program bidang advokasi dan dakwah merupakan bentuk bantuan kepada pemceramah, pembangunan rumah ibadah umat Islam, bantuan lain yang membantu kegiatan dakwah dan advokasi seperti bantuan Al-Quran hafalan khusus.

Dalam melakukan pengelolaan zakat, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

Kabupaten Soppeng melakukan pengelolaannya dalam bentuk:

## 1. Proses Perencanaan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Soppeng

Didalam pengelolaan pasti ada sebuah perencanaan yang dilakukan sebagai suatu langkah awal untuk mencapai hasil yang optimal. Sebab perencanaan merupakan nilai yang terdapat dalam suatu manajemen. Dari penjelasan diatas, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Soppeng pasti mempunyai perencanaan. Pembahasan diatas sesuai berdasarkan wawancara dengan Ketua Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Soppeng, Bapak Sukardi Deppung, dimana beliau mengatakan:

“semua perencanaan BAZNAS sudah ada dalam rencana kerja dan anggaran tahunan, jadi semu ketua sama wakil ketua dan staf saling bekerja sama mengelola zakat”<sup>2</sup>

Dari hasil wawancara dengan Ketua Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Soppeng dapat dipahami bahwasanya program perencanaan yang dilaksanakan berjalan dengan baik dan sesuai dengan yang diinginkan, meskipun dalam penerapannya masih terdapat kendala yang bermacam-macam. Kelancaran terhadap perencanaan yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Soppeng didukung oleh kesungguhan pengurus dalam menjalankan amanah.

---

<sup>2</sup> Sukardi Deppung (76 tahun), Ketua BAZNAS Kabupaten Soppeng, *Wawancara*, Kabupaten Soppeng, 24 Mei 2021.

## **2. Proses Pengorganisasian Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)**

### **Kabupaten Soppeng**

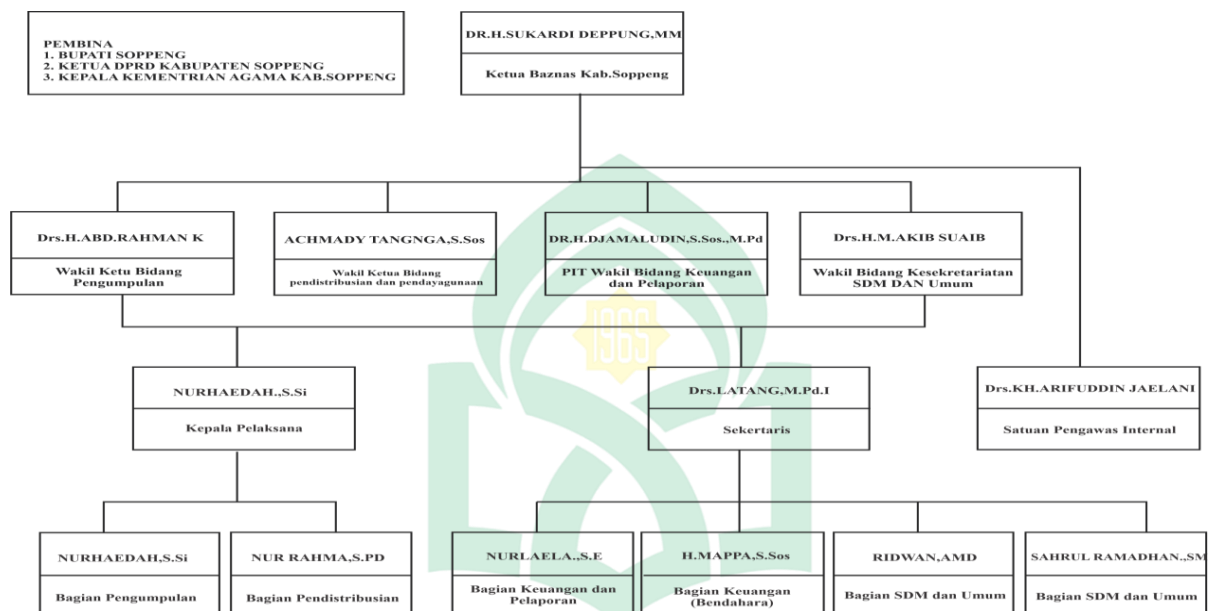
Pengorganisasian merupakan proses penyatuan pengurus untuk mengeksekusi apa yang sudah ditetapkan pada perencanaan.

Bentuk pengorganisasian yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), terdiri dari:

- a. Penyusunan Kerja
- b. Penetapan tugas pokok
- c. Perincian kegiatan
- d. Pengelompokan kegiatan sesuai fungsi
- e. Stuffing
- f. Fasilitating (pemberian fasilitas)

Susunan struktur organisasi yang terapat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Soppeng berdasarkan SK Ketua BAZNAS Nomor 24 Tahun 2018 sebagaimana pada gambar di bawah ini:

**Gambar 1**  
**Struktur Organisasi**  
**Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Soppeng**



Dalam kursi kepemimpinan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Soppeng pemerintah selaku pembina menentukan orang-orang yang layak menempati kursi kepemimpinan. Pernyataan tersebut sesuai dengan hasil wawancara dengan bapak Sukardi Deppung, sebagai berikut:

“Pengurus BAZNAS Kabupaten Soppeng beberapa dari MUI Kabupaten Soppeng, kemudian dari Kemenag, sama Tokoh Agama dan Masyarakat”<sup>3</sup>

Dari hasil wawancara diatas, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Soppeng berusaha memadukan skil-skil dari beberapa pengurus yang

<sup>3</sup> Sukardi Deppung (76 tahun), Ketua BAZNAS Kabupaten Soppeng, *Wawancara*, Kabupaten Soppeng, 24 Mei 2021.

berlatar belakang berbeda agar dapat membawa Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Soppeng dapat mengelola zakat dengan baik.

### **3. Proses Pelaksanaan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Soppeng**

Tahapan pelaksanaan merupakan kelanjutan dari sebuah proses pengorganisasian. Untuk mengelola zakat, tahap pelaksanaan yang akan dilakukan terdiri dari tahap penghimpunan zakat dan pendistribusian zakat.

Pelaksanaan Zakat harus dilaksanakan dengan sebaik-baik mungkin karena zakat menjadi permata keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan, kesejahteraan masyarakat, dan penanggulangan kemiskinan.<sup>4</sup>

#### **a. Pelaksanaan Penghimpunan Zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Soppeng**

Proses menghimpun dana zakat adalah mengumpulkan dana zakat dari para *Muzakki* kemudian disalurkan kepada masyarakat yang berhak menerima *Mustahiq*. Pengumpulan dana zakat oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Soppeng yaitu menerima dan mengambil langsung dari muzakki yang dimana pihak muzakki telah memberitahukan kepada pihak Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).

Pengumpulan dana ZIS Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Soppeng menggunakan strategi berupa pembentukan mitra kerja. Mitra Kerja tersebut

---

<sup>4</sup> Muammar Bakry, dkk, *Manajemen Zakat Maal di Kota Makassar: Telaah Atas Upaya Prduktifitas Zakat*, Al-Ulum 20, no. 1 (2020), h. 96



bekerja untuk memudahkan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dalam menjalankan penghimpunan dana zakat

Hal ini sejalan dengan penjelasan yang diberikan oleh bapak Sukardi Deppung, dimana beliau mengatakan:

“dalam pengumpulan dana zakat, infaq, dan sedekah BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Kabupaten Soppeng dilapangan sudah dibentuk UPZ di semua sektor, lembaga-lembaga kecamatan. Maksudnya semua dana zakat dikumpulkan ke UPZ, yasenng UPZ (Unit Pengumpul Zakat) di semua SKPD”<sup>5</sup>

Kemudian Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Soppeng melakukan sosialisasi. Sosialisasi ini dapat dilakukan dengan penyebaran brosur ZIS, pembuatan baliho dan spanduk. Usaha Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Soppeng dalam mengumpulkan dana zakat juga diperkuat dengan hasil wawancara dengan seorang muzakki yaitu Bapak Baharuddin yang merupakan seorang Pensiunan PNS. Bapak Baharuddin menjelaskan:

“BAZNAS datang sosialisasi ke Koperasiku tentang Zakat, Infaq, dan sedekah. Kemudian mengajak saya untuk berzakat Dan dana zakat itu nanti bisa dia datang ambil atau menjemput ke sini”<sup>6</sup>

Berdasarkan wawancara diatas, para muzakki lebih diberikan kemudahan untuk menyalurkan zakatnya, karena adanya layanan pejemputan langsung dari pihak Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Soppeng bagi muzakki yang mempunyai kendala.

---

<sup>5</sup> Sukardi Deppung (76 tahun), Ketua BAZNAS Kabupaten Soppeng, *Wawancara*, Kabupaten Soppeng, 24 Mei 2021.

<sup>6</sup> Baharuddin (70 tahun), Pensiunan PNS, *Wawancara*, Kabupaten Soppeng, 25 Mei 2021.

**Tabel 2. Penerimaan dan Pengeluaran Dana Zakat, Infaq, dan Sedekah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Soppeng**

No	Tahun	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Saldo (Rp)
1	2018	4.415.598.863	4.358.089.496	57.509.367
2	2019	4.803.543.255	4.777.602.758	25.940.497
3	2020	1.062.504.735	1.032.286.860	30.217.875

*Sumber: Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Soppeng*

Berdasarkan data diatas, penerimaan dana zakat Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Soppeng mengalami peningkatan pada tahun 2019, tetapi pada tahun 2020 mengalami penurunan yang drastis. Penerimaan zakat pada tahun 2020 hanya berkisar sebesar Rp. 935.482.164 yang dibagikan kepada 576 KK termasuk bantuan bedah rumah. Dengan rincian, penerimaan dari perorangan sebesar Rp. 345.928.345 (Tiga ratus empat puluh lima juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus empat puluh lima rupiah). Adapaun penerimaan zakat dari berbagai badan sebesar Rp. 293.658.472 (Dua ratus sembilan puluh tiga juta enam ratus lima puluh delapan empat ratus tujuh puluh dua rupiah). Penurunan drastis tersebut disebabkan karena UPZ yang telah disebar diberbagai perangkat kecamatan menyalurkan masing-masing pengumpulan dana zakatnya kemudian tidak ada laporan ke Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kab. Soppeng.

**Tabel 3. Laporan Aktivitas Dana ZIS Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Soppeng**

URAIAN	CAT	ZAKAT	INFAK	DANA SOSIAL KEAGAMAAN LAINNYA	TOTAL	%
<b>PENERIMAAN ZIS, CSR, DAN DSKL</b>				-		
Kas dan Bank awal Tahun 2020		25.940.497.00	-	-	25.940.497.00	
Zakat Perorangan	111	345.928.345.00	-	-	345.928.345.00	
Zakat Fitrah	112	269.954.850.00	-	-	269.954.850.00	
Zakat Badan/UPZ	113	293.658.472.00	-	-	293.658.472.00	
Infaq Perorangan	121	-	4.476.500.00	-	4.476.500.00	
Infaq Perorangan/Haji	122	-	-	-	-	
Infaq Badan/UPZ	123	-	122.546.071.00	-	122.546.071.00	
Penerimaan Piutang	131 132	-	-	-	-	
Hibah/APBD	133	-	-	-	-	
Jasa Giro		-	-	-	-	
<b>Total Penerimaan</b>		<b>935.482.164.00</b>	<b>127.022.571.00</b>	-	<b>1.062.504.735.00</b>	
<b>PENGELUARAN ZIS, CSR, DAN DSKL</b>						
<b>ZAKAT</b>					<b>926.847.093.00</b>	
Bidang Ekonomi	211	317.720.000.00	-	-	317.720.000.00	
Bidang Sosial Pendidikan	212	9.600.000.00	-	-	9.600.000.00	
Bidang Sosial Kemanusiaan	213	179.818.700.00	-	-	179.818.700.00	
Bidang Sosial Kesehatan	214	5.923.500.00	-	-	5.923.500.00	
Bidang Dakwah dan Advokasi	215	86.873.000.00	-	-	86.873.000.00	
Hak Amil	216				326.911.833.00	
<b>INFAQ</b>					<b>59.050.000.00</b>	
Bidang Ekonomi	221	-	-	-	-	
Bidang Sosial Pendidikan	222	-	-	-	-	
Bidang Sosial Kemanusiaan	223	-	2.500.000.00	-	2.500.000.00	
Bidang Sosial Kesehatan	224	-	-	-	-	
Bidang Dakwah dan Advokasi	225	-	2.500.000.00	-	2.500.000.00	
Hak Amil	226	-	54.050.000.00	-	54.050.000.00	

<b>DSKL</b>						
Belanja Pegawai	331	-	5.511.135.00			
Biaya publikasi/dokumen tasi	332	-	5.000.000.00			
Biaya Perjalanan Dinas	333	-	-			
Biaya Administrasi Umum	334	-	30.028.412.00			
Pengadaan Barang Inventaris Kantor	335	-	5.050.000.00			
Biaya Jasa Pihak Ketiga	336	-	-			
<b>Total Pengeluaran</b>		<b>926.847.093.00</b>	<b>105.439.767.00</b>	-	<b>1.032.286.860.00</b>	
<b>Kenaikan (Penurunan) aktivitas Bersih</b>					<b>30.217.875.00</b>	

*Sumber: Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Soppeng 2020*

b. Pelaksanaan Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Soppeng

Pendistribusian merupakan suatu proses menyalurkan dana zakat yang telah dihimpun dari muzakki kemudian disalurkan kepada para mustahiq. Pendistribusian zakat ini sebagai bentuk kelanjutan dari proses perencanaan dalam pengelolaan zakat. Sedangkan pendayagunaan merupakan proses pemberian dana zakat kepada mustahik yang dimana dalam pemberian dana zakat tersebut dianjurkan digunakan untuk merintis usaha atau mendatangkan hasil serta tetap diberikan bimbingan dari pihak Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).

Lebih lanjut Ketua BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Kabupaten Soppeng, Bapak Sukardi Deppung, mengutarakan bahwa:

”kami dalam pendistribusian dan pandayagunaan zakat benar-benar selektif, apakah masuk kategori bantuan konsumtif atau produktif karena jangan sampai kami kasi bantuan produktif cappu tommy matu duina nasaba de nissenngi putarai duina”<sup>7</sup>

Dari hasil wawancara dengan ketua Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Soppeng. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sangat ketat dalam pemberian bantuan, kemudian mengenai bantuan produktif pihak Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) masih sedikit menyalurkan dananya.

Sebagaimana yang dikatakan oleh ketua BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Kabupaten Soppeng diatas bahwa minimnya bantuan zakat produktif dikarenakan mustahiqnya yang tidak kompeten menjalankan kegiatan usahanya.

Berikut tabel pengelolaan dana zakat tahun 2020:

**Tabel 3. Pendistribusian Dana Zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Soppeng**

NO	URAIAN	PENERIMAAN (Rp)	PENGELUARAN
	<b>Penerimaan ZAKAT</b>	<b>935.482.164</b>	<b>926.847.093</b>
1	Bidang Ekonomi		317.720.000
2	Bidang Sosial Pendidikan		9.600.000
3	Bidang Sosial Kemanusiaan		179.818.700

<sup>7</sup> Sukardi Deppung (76 tahun), Ketua BAZNAS Kabupaten Soppeng, *Wawancara*, Kabupaten Soppeng, 24 Mei 2021.

4	Bidang Sosial Kesehatan		5.923.500
5	Bidang Dakwah Dan Advokasi		86.873.000
6	Hak Amil		326.911.893

*Sumber: Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Soppeng 2020*

#### **4. Upaya Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Soppeng Dalam Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Soppeng**

Pengentasan kemiskinan sudah banyak di laksanakan, namun masih saja belum efektif untuk mendapatkan hasil yang optimal. Dalam islam, instrumen yang paling diutamakan adalah zakat, karena zakat merupakan pranata keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan, kesejahteraan masyarakat, serta penanggulangan kemiskinan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 menyebutkan bahwa pendistribusian dana zakat wajib diberikan kepada mustahiq berdasarkan pada syariat Islam dengan mengedepankan hal-hal pokok yang tetap masuk dalam prinsip keadilan, pemerataan, dan kewajiban. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Soppeng melakukan penyaringan terkait jenis-jenis dana zakat dengan dana lainnya. karena dana zakat memiliki kegunaan khusus dalam pendistribusian, berdasarkan firman Allah swt. QS. Al-Taubah/9: 60

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

Terjemahnya:

“Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (muallaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah maha mengetahui, maha bijaksana.”<sup>8</sup>

Berdasarkan ayat diatas Imam Syafi’i berkata, “Siapun tidak boleh membagi-bagikan zakat tanpa mengikuti apa yang telah ditetapkan oleh Allah swt. hal itu jika kedelapan kelompok mustahiq itu ada. Karena hanya kelompok mustahiq yang ada dapat memperoleh bagian zakat.”<sup>9</sup>

Imam Syafi’i juga berkata, “Zakat yang diambil dari suatu kaum hendaknya dibagikan kepada orang yang berhak yang hidup sekampung dengan mereka dan tidak dibagikan keluar lingkungan mereka, kecuali jika tidak ada seorangpun yang berhak menerima zakat.”<sup>10</sup>

Berkaitan dengan ayat diatas, para ulama berbeda pendapat terhadap delapan kelompok mengenai pembagian zakat yang meliputi semuanya, atau sebatas kemungkinan. Dalam hal ini terdapat dua pendapat:<sup>11</sup>

<sup>8</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h.197

<sup>9</sup> Syaikh Ahmad Mustafa Al-Farran, *Tafsir Al-Imam asy-Syafi'i Jilid 2*. Terj. Ali Sultan, *Tafsir Imam Syafi'i Jilid 2*, (Jakarta: Almahira, 2008). h. 642

<sup>10</sup> Syaikh Ahmad Mustafa Al-Farran, *Tafsir Al-Imam asy-Syafi'i Jilid 2*. Terj. Ali Sultan, *Tafsir Imam Syafi'i Jilid 2*. h. 642

<sup>11</sup> Al-Imam Abul Fida Isma'il Ibnu Katsir Ad-Dimasyqi, *Tafsuru Al-Qur'anu Al-'Azimi*. terj. Bahrin Abu Baka, *Tafsir Ibnu Katsir*, (Solo: Insan Kamil, 2015), h. 176

Pertama, harus meliputi semuanya. Ini adalah pendapat Imam Asy-Syafi'i dan sekelompok ulama. Kedua, tidak harus semuanya. Harta zakat boleh dibagikan kepada satu kelompok saja, meskipun terdapat sekelompok lain. Ini adalah pendapat Imam Malik dan sekelompok ulama salaf dan khalaf, diantaranya adalah 'Umar, Hudzaifah, Ibnu Abbas, Abu; 'Aliyah, Sa'id Bin Jubair, dan Maimun Bin Mihran. Ibnu Jarir berkata: "ini adalah pendapat sebagian besar ulama." Penyebutan kelompok-kelompok dalam ayat tersebut adalah untuk menjelaskan mereka yang berhak, bukan karena keharusan memenuhi semuanya. Adapun pemaparan argumentasi antar pendapat yang berselisih bukan disini temoatnya. *Wallahu A'lam*.

Berikut rencana penyaluran zakat yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Soppeng kepada masing-masing asnaf pada tahun 2020:

**Tabel 4. Rencana Penyaluran dan Saldo Dana Berdasarkan Asnaf Tahun 2020**

Jenis Dana	%	Jumlah
<b>Penyaluran Dana Zakat</b>	<b>100,0%</b>	<b>1.115.000.000</b>
Penyaluran Dana Zakat Untuk Fakir	29,1%	325.000.000
Penyaluran Dana Zakat Untuk Miskin	34,2%	381.150.000
Penyaluran Dana Zakat Untuk Amil	10,7%	119.250.000
Penyaluran Dana Zakat Untuk Muallaf	6,8%	76.200.000
Penyaluran Dana Zakat Untuk Riqab	1,8%	20.000.000
Penyaluran Dana Zakat Untuk Gharimin	4,4%	48.700.000
Penyaluran Dana Zakat Untuk Sabilillah	7,1%	79.000.000
Penyaluran Dana Zakat Untuk Ibnu Sabil	5,9%	65.700.000

*Sumber: Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Soppeng 2020*



Berdasarkan data-data yang dikumpulkan diatas, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Soppeng telah melaksanakan pengelolaan zakat dengan baik karena telah melakukan penyaluran zakat berdasarkan asnaf.

Upaya Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Soppeng menanggulangi kemiskinan ditanggapi oleh seorang mustahiq yang bernama bapak Anwar di Kecamatan Lalabata, beliau mengatakan:

“Makkiguna ladde bantuanna BAZNAS, duampulenna mattarima sekke’ yanaro upake mabbalanca esso-esso, tennapodo de’ nappettu bantuanna”<sup>12</sup>

Dari wawancara diatas, dapat dipahami bahwa bantuan yang diberikan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Soppeng sangat bermanfaat. Dengan adanya bantuan ini para mustahiq dapat menggunakannya untuk kebutuhan hidup keluarga. Bantuan-bantuan yang diberikan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Soppeng agar kiranya disempurnakan oleh pembimbingan sebelum dan sesudah bantuan tersebut diserahkan, gunanya untuk agar terjadinya perkembangan ekonomi sehingga dapat berubah yang semula menjadi penerima zakat menjadi pemberi zakat. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten soppeng dalam menjalankan bantuan konsumtif didasari oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 terdapat pada bagian kedua membahas mengenai pendistribusian, pasal

---

<sup>12</sup> Anwar (47 tahun), Pekerja Serabutan, *Wawancara*, Kabupaten Soppeng, 25 Mei 2021.

26 menyebutkan bahwa pendistribusian zakat, dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan.

Sedangkan bantuan produktif yaitu bantuan yang diberikan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Soppeng berupa pelatihan-pelatihan keterampilan agar dapat mengembangkan kemampuannya agar mampu keluar dari kungkungan kemiskinan. Pelatihan-pelatihan yang dimaksud yaitu pengembangan ekonomi dari segi sektor usaha dengan cara memberikan modal usaha bergulir namun akan tetap dilakukan monitoring. Mengoptimalkan fungsi zakat sebagai instrument pemerataan perekonomian umat harus dengan adanya koprofesional lembaga yang bisa mengurus pengelolaan zakat dengan baik serta amanah.<sup>13</sup>

Bantuan produktif oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Soppeng mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 pada pasal 27 ayat 1 dan 2 menyebutkan bahwa zakat boleh digunakan untuk bantuan produktif, kemudian pada ayat 2 menyebutkan bahwa pendayagunaan zakat untuk usaha produktif dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahiq tercukupi. Akan tetapi, pada Tahun 2020 bantuan zakat produktif tidak disalurkan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kab. Soppeng karena pada Tahun 2020 dana untuk bantuan zakat produktif tidak cukup dikarenakan menurunnya bantuan dana zakat yang terkumpul pada Tahun tersebut. Dalam pendayagunaan zakat produktif tentu ada kategori untuk

---

<sup>13</sup> Nur Taufiq Sanusi, dkk, *Pendayagunaan Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam*, Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah 2, no. 3 (2020), h. 71

dapat diberikan kepada masyarakat seperti pemantauan keterampilan serta perkembangan usahanya apakah sudah memungkinkan mendapat bantuan tersebut .

Sebagaimana hasil wawancara dengan Ketua Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kab. Soppeng, Bapak Sukardi Deppung, mengutarakan bahwa:

“mengenai bantuan zakat produktif tidak ada memang karena yang kategori bantuan untuk zakat produktif harus dulu dipantau perkembangan usahanya mustahiq yang dikasi bantuan, kemudian pada tahun 2020 dana untuk bantuan dana zakat produktif tidak cukup, jadi difokuskan ke konsumtif seperti pangan, pendidikan termasuk juga bencana”<sup>14</sup>

### ***C. Hambatan Yang di Hadapi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Soppeng***

#### **1. Hambatan Yang Dihadapi**

Pengelolaan zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) pasti ada saja hambatan yang dihadapi. Adapun hambatan-hambatan yang dihadapi sebagai berikut:

- a. Tidak terdapat sanksi yang tegas dalam Undang-Undang Pengelolaan Zakat untuk orang yang tidak berzakat

Dalam Undang-Undang Pengelolaan Zakat, tidak terdapat sanksi untuk orang/badan huku, yang tidak menunaikan zakat. Walaupun dalam Undang-Undang tersebut disebutkan bahwa ”Setiap warga negara Indonesia

---

<sup>14</sup> Sukardi Deppung (76 Tahun), Ketua BAZNAS Kab. Soppeng, Wawancara, Kabupaten Soppeng, 19 Juli 2021.

yang beragama Islam dan atau badan hukum yang dimiliki, untuk orang muslim berkewajiban membayar zakat.”

Akan tetapi dalam Undang-Undang Pengelolaan Zakat hanya diatur mengenai sanksi pengelolaan zakatnya saja, maka dari itu terkait sanksi pengelolaan zakat diancam dengan hukuman kurungan tiga bulan dan atau denda sebanyak Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) diatur menurut pasal 21 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.

b. Keterbatasan Dana

Dana yang masuk dalam pengelolaan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Soppeng memberikan efek yang sangat besar. Pada kenyataannya, dana yang masuk pada kas Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Soppeng tidak seimbang dengan jumlah masyarakat miskin. Terlebih pada tahun 2020 dana zakat yang masuk sangat menurun drastis dibanding pada tahun 2018 dan 2019.

c. Kesadaran berzakat bagi para muzakki pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sangat minim

Untuk mendapatkan dana zakat yang cukup untuk disalurkan kepada masyarakat (*Mustahiq*) tentu dibutuhkan kesadaran berzakat yang optimal terhadap muzakki. Pada kenyataannya, masih banyak muzakki yang seharusnya berzakat tapi tidak mempunyai kesadaran yang baik dalam hal berzakat yang mengakibatkan kurang optimalnya dana zakat yang tersalurkan.

## **2. Upaya Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Soppeng Dalam Menyelesaikan Hambatan Yang Dihadapi**

Dalam menyelesaikan hambatan yang dihadapi, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Soppeng melakukan berbagai upaya-upaya, sebagai berikut:

### **a. Membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ)**

Tujuan dibentuknya Unit Pengumpul Zakat (UPZ) pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Soppeng yaitu sebagai mitra kerja untuk memudahkan pengumpulan dana zakat diberbagai lembaga di Kabupaten soppeng

### **b. Memberikan Kemudahan Kepada Muzakki**

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Soppeng membuat inovasi yang baik dalam memberikan pelayanan kepada muzakki yaitu dengan melakukan layanan penjemputan zakat dan lain-lainnya bagi para muzakki untuk mengumpulkan zakatnya.

### **c. Penyaluran Zakat Secara Tunai**

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Soppeng melakukan penghimpunan dan penyaluran zakat dengan cara terjun langsung ke lokasi yang sudah di data. Upaya yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dapat memberikan citra yang baik.

Jadi, zakat menjadi solusi semua persoalan ummat, khususnya dalam peningkatan ekonomi umat. Tujuan zakat bukan hanya memberi bantuan konsumtif-produktif tetapi mengubah keadaan mustahiq menjadi lebih baik dan mermartabat sesuai dengan kehormaatannya sebagai manusia.<sup>15</sup> Adapun tujuan pengelolaan zakat adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menunaikan dan dalam pelayanan ibadah zakat sesuai dengan hukum Islam, meningkatkan fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan perekonomian masyarakat dan keadilan sosial, meningkatkan hasil guna dan daya zakat.<sup>16</sup> Oleh karena itu, dalam pengelolaan zakat harus berdasarkan iman dan takwa sehingga dapat mewujudkan keadilan sosial, keterbukaan, dan kepastian hukum.



---

<sup>15</sup> Muhammad Anis, *Zakat Pemberdayaan Masyarakat*, El-Iqtishady 2, no. 1 (2020), h. 44

<sup>16</sup> Basyirah Mustarin, *Urgensi Pengelolaan Zakat Terhadap Peningkatan Perekonomian Masyarakat*, Jurisprudentie 4, no. 2 (2017), h. 94

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### ***A. Kesimpulan***

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dari bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Mekanisme pengelolaan zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 yang menyebutkan bahwa pengelolaan zakat mencakup proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengordinasian dalam pengumpulan serta pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Dalam pendistribusian dan pendayagunaan batuan dana zakat, terdapat beberapa bidang yang terdiri dari : Bidang Ekonomi, Bidang Pendidikan, Bidang Kemanusiaan, Bidang Kesehatan, serta Bidang Advokasi dan Dakwah. Adapun bentuk penyaluran dana zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Soppeng terdiri dari penyaluran dana zakat secara konsumtif dalam hal pendistribusian dan penyaluran dana zakat secara produktif dalam hal pendayagunaan. Terkait upaya Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Soppeng dalam pengentasan kemiskinan. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Soppeng menyalurkan bantuan dana zakat tersebut kepada delapan (8) Asnaf. Bantuan konsumtif yang disalurkan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Soppeng mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 pada bagian kedua pasal 26, sedangkan bantuan produktif mengacu pada pasal 27 ayat 1 dan 2.

2. Hambatan yang dihadapi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Soppeng dalam upaya pengentasan kemiskinan yaitu tidak terdapat sanksi yang tegas dalam Undang-Undang Pengelolaan Zakat, Keterbatasan dana, kesadaran berzakat bagi para muzakki pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Soppeng sangat minim. Maka dari itu, untuk menyelesaikan hambatan yang dihadapi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Soppeng melakukan berbagai upaya pencegahan hambatan, yaitu : membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ), memberikan kemudahan bagi para muzakki, serta penyaluran zakat secara tunai.

#### ***B. Saran***

Setelah melihat bagaimana pengelolaan zakat terhadap pengentasan kemiskinan, maka peneliti akan mengajukan beberapa saran, sebagai berikut:

1. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Soppeng agar kiranya lebih meningkatkan pengelolaan zakat khususnya dalam hal pendataan masyarakat kurang mampu dan pengumpulan dana zakat, karena banyaknya masyarakat kurang mampu yang belum terdata serta pengumpulan dana masih kurang dibandingkan jumlah masyarakat.
2. Seluruh pihak yang mengelola Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Soppeng secara konsisten harus terus menjadikan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Soppeng mengalami peningkatan dalam pengelolaan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, infak, dan sedekah secara profesional sehingga dapat membantu ekonomi masyarakat



yang berpenghasilan rendah terlebih lagi semakin terpuruknya perekonomian dari dampak covid-19.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agussalim. 2009. *Mereduksi Kemiskinan Sebuah Proposal Baru Untuk Indonesia*. Makassar: Nala Cipta Litera.
- Al-Arabiyah, Majma, Lughah. 1972. *Al-Mu'jam Al-Wasith*. Mesir: Daar El-Ma'arif.
- Al-Farran, Syaikh Ahmad Mustafa. 2008. *Tafsir Al-Imam Asy-Syafi'i Jilid 2*. terj. Ali Sultan, *Tafsir Imam Syafi'i Jilid 2*. Jakarta: Almahira.
- Ali, Muhammad Daud. 1988. *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*. Jakarta: Universitas Indonesia, UI-Press.
- Al-Jurjawi, Syekh, Ali Ahmad. 2015. *Hikmatut Tasyri' Wa Falsafatuhu*. Terj. Toyib Arifin. "Hikmatut Tasyri' Menyingkap Hikmah Di Balik Perintah Ibadah". Yogyakarta: Qudsi Media.
- Al-Juzairi, Abdurrahman. 2015. *Al-Fiqh 'Ala Madzhahib Al-Arba'ah*. Terj. Shofa'u Qolbi Djabir. "Fikih Empat Madzhab Jilid 2". Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar.
- Al-Mahfani, Khalilurrahman. 2008. *Buku Pintar Shalat, Pedoman Shalat Lengkap Menuju Shalat Khusyuk*. Jakarta Selatan: KawahMedia.
- Al-Zuhaili, Wahbah. 2016. *Al-Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. terj. Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk. "Fikih Islam dan Dalilnya". Jakarta: Gema Insani. dikutip dalam Fuadi. *Zakat dalam Sistem Hukum Pemerintahan Aceh*. Cet. 1; Yogyakarta: Deepublish.
- Andrianto, Irsyad. 2011. *Strategi Pengelolaan Zakat dalam Pengentasan Kemiskinan*. 19, no 1.
- Anis, Muhammad. 2020. *Zakat Solusi Pemberdayaan Masyarakat*. El-Iqtishady 2, no. 1.
- Ansory, Isnan. 2020. *10 Perbedaan antara Zaakat Maal dan Zakat Fithri*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing
- Badruddin, Munawwar, dan Abdul Razak, Norhafizah, Binti. 2011. *Reorientasi Tentang Zakat Perniagaan: Pengalaman Malaysia*. *Media Syariah* 08, no. 02.
- Bakry, Muammar, dkk. 2020. *Manajemen Zakat Maal di Kota Makassar: Telaah Atas Upaya Produktifitas Zakat*. *Al-Ulum* 20, no. 1.

- Bank Indonesia. 2016. *Pengelolaan Zakat Yang Efektif: Konsep dan Praktik di Beberapa Negara*. Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah-Bank Indonesia.
- Barkah, Qodariah, Dkk. 2020. *Fikih Zakat, Sedekah, dan Wakaf*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Buhaerah. 2019. *Menyikapi Pemilu Berkeadaban: Wujudkan Demokrasi Yang “Melebihi Warekkadanna, Makkeadan Ampena” (Sopan Dalam Bertutur Santun Dalam Berperilaku)*. Pare-Pare: IAIN Pare-Pare.
- Bukhari, Imam. 1986. *At Tajrid Ash Sharih*, terj. Zaenuddin Ahmad Azzubaidi, *Hadits Shahih Bukhari*. Semarang: C.V. Toha Putra.
- Cahyani, A Intan. 2020. *Zakat Profesi Dalam Era Kontemporer*. El-Iqtishady 2, no. 2.
- Departemen Agama RI. 2000. *Al-Qur'an dan Terjemahan*. Jakarta: Mekar Surabaya.
- Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. 2011. “Undang-Undang Republik Indonesia no 13 tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin. Jakarta: Kementerian Sekretariat Negara.
- Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. 2015. *Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat*. Dikutip dalam Mardani. *Islam: Kumpulan Peraturan Tentang Hukum Islam di Indonesi*. Cet 2; Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Faidati, Ashima. 2018. *Pendistribusian Zakat Perdagangan Telur Ayam Petelur*. *Ahkam*, 06, no. 01.
- Ghozali, K.H.M. Syukri, Dkk. 2001. *Pedoman Zakat 9 seri*. Jakarta: Proyek Peningkatan Sarana Keagamaan Islam, Zakat dan Wakaf.
- Hakim, Rahmad. 2020. *Manajemen Zakat : Histori, Konsepsi, dan Implementasi*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Hayati, Mardhiyah. 2012. *Peran Pemerintah dalam Pengelolaan Zakat dalam Rangka Penanggulangan Kemiskinan dan Peningkatan Pendidikan di Indonesia*. 4, no 2.
- <https://sulselprov.go.id> (29 Juni 2021)
- Hudaifah, Ahmad, dkk. 2020. *Sinergi Pengelolaan Zakat di Indonesia*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka.

- Ibnu Katsir Ad-Dimasyqi, Al-Imam Abul Fida Isma'il. 2015. *Tafsuru Al-Qur'an Al-Azimi*. terj. Bahrin Abu Baka, *Tafsir Ibnu Katsir*. Solo: Insan Kamil.
- Jayadi, Ahkam. 2017. *Membuka Tabir Kesadaran Hukum*. Jurisprudentie 4, no. 2.
- Kasim, Mohammad, Uda. 2009. *Zakat Teori, Kutipan dan Agihan*. Bandung: PT. Mizan Pustaka.
- Labib, dan Ridhoi Moh. 2020. *Kuliah Ibadah Ditinjau dari Segi Hukum dan Maknanya*. dikutip dalam Barkah, Qodariah, Dkk. *Fikih Zakat, Sedekah, dan Wakaf*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Lexy. J, Moleong. 2006. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT. Remaja Rosda Karya.
- Mardani. 2015. *Aspek Hukum Lembaga keuangan Syariah di Indonesia*. cet.2, Jakarta: Kencana.
- Marimin, Agus, dan Fitria, Tira, Nur. 2015. *Zakat Profesi (Zakat Penghasilan Menurut Hukum Islam*. *Jurnal ilmiah Ekonomi Islam* 01, no. 01.
- Marzuki, Mahmud. 2006. *Penelitian Hukum*. Jakarta : Kencana.
- Mas Afifah, Fajri. 2015. *Peran Lembaga Islam dalam Mengentaskan Kemiskinan (Studi Kasus Pada Baitul Maal Hidayatullah Cabang Malang)*. Skripsi. Malang: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya.
- Masdar, Mas'udi, F, dkk. 2004. *Reinterpretasi Pendayagunaan ZIS Menuju Efektifitas Pemanfaatan Zakat, Infak, Shadqah*. Jakarta: Piramedia.
- Muhajir, Noeng. 1996. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Yogyakarta: Rake Sarasin.
- Mustamin, Basyira. 2017. *Urgensi Pengelolaan Zakat Terhadap Peningkatan Perekonomian Masyarakat*. Jurisprudentie 4, no. 2.
- Nurhayati, Sri. 2019. *Akuntansi Syariah di Indonesia*. Jakarta Selatan: Salemba Empat.
- Nurhidayati, Annisa. 2006. *Fikih untuk kelas VIII MTs/ Hasbiyallah*. Bandung: Grafindo Media Pratama.
- Patimah, dan Muhammad Asri, 2021. *Penyaluran ZIS di LAZNAS Yatim Mandiri Makassar Perpektif Hukum Islam (2019-2020)*. QadauNa 2, no. 2.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia. 2014. *Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 166 tahun 2014 tentang Pengentasan Kemiskinan*. Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM.

- Pratama, Yoghi, Citra. 2015. *Peran Zakat Dalam Penanggulangan Kemiskinan, The Jurnal of Tauhidinomics* 01. no. 01.
- Qadir, Abdurrahman. 1998. *Zakat Dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Qomari, Nur. 2017. *Zakat: Solusi Pengentasan Kemiskinan*. Iqtishodia Jurnal Ekonomi Syariah, Vol.2 No.2.
- Sabiq, Sayyid. 2017. *Fiqih Sunah*. Terj. Mahyuddin Syaf. "Fiqih Sunah Jilid 2". Jakarta: Pustaka Abdi Bangsa.
- Safriani, Andi. 2017. *Positivisasi Syariat Islam di Indonesia*. Al-Qadau 4. No. 2.
- Sanusi, Nur Taufiq, dkk. 2020. *Pendayagunaan Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam*. Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah 2, no. 3.
- Sari, Elsi, Kartika. 2006. *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*. Jakarta: PT Grasindo.
- Setiawan, Firman. 2019. *Panduan Pelaksanaan Zakat Hasil Tambak Garam*. Jawa Timur: Duta Media Publishing.
- Shomad, Abd. 2017. *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Soemitra, Andri. 2018. *Bank dan Lembaga Keuangan syariah*. Jakarta: Kencana.
- Sohrah. 2020. *Aktualisasi Konsep Ekonomi Adil Menurut Al-Qur'an*. El-Iqtishady 2, no. 1.
- Sunggono, Bambang. 2007. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta : Rajagrafindo Persada.
- Supardin. 2017. *Produk Pemikiran Islam di Indonesia*. Al-Qadau 4, no. 2.
- Suparta, Mundzier. 2010. *Pendidikan Agama Islam Fiqhi*. Semarang: PT. Karya Toha Putra.
- Syamsuddin, Darussalam. 2015. *Tranformasi Hukum Islam di Indonesia*. Al-Qadau 2, no. 1.
- Syauqi, Beik, Irfan, dan M. Baga, Lukman. 2011. *Menggagas Islamic Poverty dan Strategi Pemberdayaan Dhuafa*. dikutip dalam A. Kasri, Rahmatina, dan Haryono, Arif. *Bangsa Betah Miskin*. Jakarta: Indonesia Magnificence of Zakat.

- Usman Ismail, Asep. 2012. *Al-Qur'an dan Kesejahteraan Sosial*. Tangerang: Lentera Hati.
- Wijaya, Abdi. 2019. *Respon Lembaga Fatwa Terhadap Isu Fikih Kontemporer (Studi Komparatif Lembaga Fatwa MUI, Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Bahtsul Masa'il NU)*. Mazahibu: Jurnal Perbandingan Mazhab 1, no. 2.
- Yaqin, Ainul. 2016. *Fiqh Ibadah Kajian Komprehensif Tata Cara Ritual dalam Islam*. Jawa Timur: Duta Media Publishing.
- Yustiani, Tuti. 2008. *Be Smart Pendidikan Agama Islam*. Bandung: Grafindo Media Pratama.
- Yusuf, Mohammad, Asror. 2004. *Kaya Karena Allah*. Tangerang: Kawan Pustaka.

## LAMPIRAN-LAMPIRAN



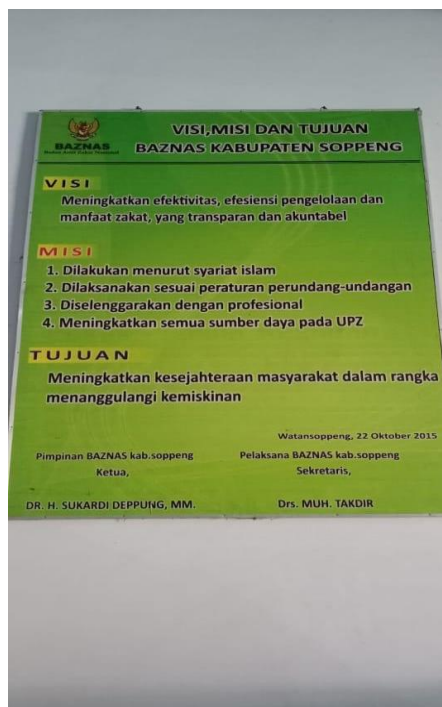
**Gambar 1. Kantor BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Kabupaten Soppeng**



**Gambar 2. Wawancara dengan Bapak H. Sukardi Deppung, MM. (Ketua BAZNAS Kab. Soppeng)**



**Gambar 3. Wawancara dengan Bapak H. Sukardi Deppung, MM. (Ketua BAZNAS Kab. Soppeng)**



**Gambar 4. Visi, Misi dan Tujuan BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Kabupaten Soppeng**





**Gambar 5. Struktur Organisasi BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Kabupaten Soppeng**

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN PIMPINAN BAZNAS KABUPATEN SOPPENG  
NOMOR : 10/KPTS/BAZNAS.KAB/IV/2017  
TANGGAL : 3 APRIL 2017

**TENTANG  
PENJABARAN PEMBAGIAN TUGAS  
BAZNAS KABUPATEN SOPPENG**

- I. **KETUA** (DR. H. SUKARDI DEPPUNG, MM.)  
Membidangi dan mengkoordinir semua kegiatan.
- II. **Wakil Ketua I** (Drs. H. ABD. RAHMAN K.)  
Membidangi : Pengumpulan  
Anggotanya : 1. NURHAEDAH, S.Si  
2. DR. H. DJAMALUDDIN, S.Sos., M.Pd  
3. H. TASLIM BASRI DAUD, LC
- III. **Wakil Ketua II** (ACHMADY TANNGA, S.Sos.)  
Membidangi : Pendistribusian dan pendayagunaan  
Anggotanya : 1. Drs. M. TAKDIR  
2. NUR RAHMA, S.Pd
- IV. **Wakil Ketua III** (H. DJOHARI TARIMA, BA.)  
Membidangi : Keuangan dan Pelaporan  
Anggotanya : 1. H. MAPPA, S.Sos  
2. ADAM PADU  
3. RIDWAN, A.Md
- V. **Wakil Ketua IV** (Drs. H. M. AKIB SUAB)   
Membidangi : Administrasi, SDM dan Umum  
Anggotanya : 1. SYAHRUL RAMADHANA, S.M  
2. NURLAELA, SE
- VI. **Siaga Bencana**  
Anggotanya : 1. NURHAEDAH, S.Si  
2. NUR RAHMA, S.Pd  
3. RIDWAN, A.Md  
4. SYAHRUL RAMADHANA, S.M

Watansoppeng, 3 April 2017  
BAZNAS KABUPATEN SOPPENG  
KETUA  
DR. H. SUKARDI DEPPUNG, MM.

**Gambar 6. Penjabaran Pembagian Tugas BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Kabupaten Soppeng**



**Gambar 7. Bersama dengan Para Pimpinan BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Kabupaten Soppeng**



**Gambar 8. Wawancara dengan Bapak Baharuddin (Pensiunan PNS) dan Pemberi Zakat/Muzakki**



**Gambar 9. Wawancara dengan Bapak Anwar (Pekerja Serabutan) dan Penerima Bantuan Dana Zakat/Mustahiq**

**SURAT BUKTI WAWANCARA**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : H. Surardi Deppung, MM.

Jabatan/Pekerjaan : Ketua BAZNAS Kab. Soppeng

Alamat : Lapogung

Telah menjadi narasumber dalam penelitian Skripsi dengan Judul "Pengelolaan Zakat Terhadap Pengentasan Kemiskinan Pada BAZNAS Kab Soppeng".

Dengan Saudara:

Nama : Ahmad Arsyi Afdali

NIM : 11000117005

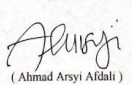
Semester : VIII (Delapan)

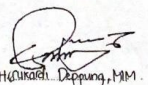
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah dan Hukum

Demikian surat ini dibuat untuk digunakan sebagai bukti wawancara agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Watansoppeng, 2021

Peneliti :   
(Ahmad Arsyi Afdali)

Narasumber :   
H. Surardi Deppung, MM.

## SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : *Anwar*

Jabatan/Pekerjaan : *wirausaha*

Alamat : *Sewo*

Telah menjadi narasumber dalam penelitian Skripsi dengan Judul "Pengelolaan Zakat Terhadap Pengentasan Kemiskinan Pada BAZNAS Kab. Soppeng".

Dengan Saudara:

Nama : Ahmad Arsyi Afdali

NIM : 11000117005

Semester : VIII (Delapan)

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah dan Hukum

Demikian surat ini dibuat untuk digunakan sebagai bukti wawancara agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Watansoppeng, 2021

Peneliti

Narasumber

*Arsyi*  
(Ahmad Arsyi Afdali)

*Anwar*  
(Anwar.....)

## SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : *Baharuddin, S.Pd.*

Jabatan/Pekerjaan : *Penerimaan PNS / Sekretaris Koperasi*

Alamat : *BTK Hweda Permai*

Telah menjadi narasumber dalam penelitian Skripsi dengan Judul "Pengelolaan Zakat Terhadap Pengentasan Kemiskinan Pada BAZNAS Kab. Soppeng".

Dengan Saudara:

Nama : Ahmad Arsyi Afdali

NIM : 11000117005

Semester : VIII (Delapan)

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah dan Hukum

Demikian surat ini dibuat untuk digunakan sebagai bukti wawancara agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Watansoppeng, 2021

Peneliti

Narasumber

*Arsyi*  
(Ahmad Arsyi Afdali)

*Baharuddin, S.Pd.*  
(Baharuddin, S.Pd.)





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Kampus I : Jalan Sultan Alauddin No.63 Telp. (0411) 864928-864930 Fax.864923  
Kampus II : Jl. H.M. Yasin Limpo No.36, Romangpolong-GowaTelp. 0411-841879, Fax: 0411-82211400

Nomor : B- 3463 /SH.01 /PP.00.9/04/2021

Gowa, 19 April 2021

Sifat : Penting

Lamp. : Proposal

Hal : *Permohonan Izin Penelitian*

**Kepada Yth :**

**Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan**

**Cq. Kepala UPT P2t, BKPM D Prov. Sul-Sel**

**di**

**Makassar**

Assalamu 'Alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat disampaikan bahwa mahasiswa UIN Alauddin Makassar yang tersebut di bawah ini :

Nama : Ahmad Arsyi Afdali  
Nim : 11000117005  
Fakultas : Syariah dan Hukum  
Jurusan/prodi : Hukum Ekonomi Syariah  
Semester : VIII (Delapan)  
Alamat : Kec. Lalabata Kab. Soppeng

Bermaksud melakukan Penelitian dalam rangka penyusunan Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana, dengan judul skripsi :

**" Peran Zakat dalam Pengentasan Kemiskinan pada Baznas Kabupaten Soppeng".**

Dosen Pembimbing :

1. Dr. Nur Taufiq Sanusi, M.Ag.
2. Andi Intan Cahyani, S.Ag., M.Ag.

Untuk maksud tersebut kami memohon kepada Bapak kiranya berkenan memberi izin untuk melakukan penelitian di **BAZNAS Kab. Soppeng**, terhitung mulai tanggal 19 April 2021 s.d. 19 Mei 2021  
Demikian permohonan kami, atas perhatian dan bantuan bapak diucapkan terima kasih.

Wassalam

  
H. Muhammad Muhammad Bakry, Lc., M.Ag.  
Nip. 19731122 200012 1 002

**Tembusan:**

- Rektor UIN Alauddin Makassar di Gowa



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN**

Nomor : 13698/S.01/PTSP/2021  
 Lampiran : -  
 Perihal : **Izin Penelitian**

Kepada Yth.  
 Bupati Soppeng

di-  
**Tempat**

Berdasarkan surat Dekan Fak. Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar Nomor : B-3463/SH.01/PP.00.9/04/2021 tanggal 19 April 2021 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

Nama : **AHMAD ARSYI AFDALI**  
 Nomor Pokok : 11000117005  
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
 Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa(S1)  
 Alamat : Jl. H. M. Yasin Limpo No. 36, Samata-Gowa

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka penyusunan Skripsi, dengan judul :

**" PERAN ZAKAT DALAM PENGENTASAN KEMISKINAN PADA BAZNAS KAB. SOPPENG "**

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **21 April s/d 19 Mei 2021**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami **menyetujui** kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik dan Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan menggunakan **barcode**.

Demikian surat izin penelitian ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar  
 Pada tanggal : 21 April 2021

**A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN**  
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU**  
**SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN**  
 Selaku Administrator Pelayanan Perizinan Terpadu

**Dr. JAYADI NAS, S.Sos., M.Si**  
 Pangkat : Pembina Tk.I  
 Nip : 19710501 199803 1 004

Tembusan Yth  
 1. Dekan Fak. Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar di Makassar;  
 2. *Pertinggal*.

SIMAP PTSP 21-04-2021



Jl. Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936  
 Website : <http://simap.sulselprov.go.id> Email : [ptsp@sulselprov.go.id](mailto:ptsp@sulselprov.go.id)  
 Makassar 90231





SRN CO0004000

**PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG**  
**DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,**  
**TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI**

*Jl. Salotungo No. 2 Tlp. 0484 - 23743 Watansoppeng 90812*

## IZIN PENELITIAN

**Nomor : 164/IP/DPMPTNT/V/2021**

DASAR	1. Surat Permohonan <b>AHMAD ARSYI AFDALI</b>	Tanggal <b>06-05-2021</b>
	2. Rekomendasi dari <b>BAPPELITBANGDA</b>	
	Nomor <b>167/IP/REK-T.TEKNIS/BAP/V/2021</b>	Tanggal <b>17-05-2021</b>

**MENGIZINKAN**

KEPADA  
NAMA : **AHMAD ARSYI AFDALI**  
UNIVERSITAS/ : **UIN ALAUDDIN MAKASSAR**  
LEMBAGA  
Jurusan : **HUKUM EKONOMI SYARIAH**  
ALAMAT : **JL. PAKKANREBETE NO. 268, KEL. LALABATA RILAU, KEC. LALABATA**  
UNTUK : melaksanakan Penelitian :

**JUDUL PENELITIAN : PERAN ZAKAT DALAM PENGENTASAN KEMISKINAN PADA BAZNAS KAB. SOPPENG**

LOKASI PENELITIAN : BAZNAS KAB. SOPPENG

**JENIS PENELITIAN : KUALITATIF**

**LAMA PENELITIAN : 27 April 2021 s.d 30 Mei 2021**

Izin Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung dan dapat dicabut apabila terbukti melakukan pelanggaran sesuai ketentuan perundang - undangan

Ditetapkan di : Watansoppeng  
Pada Tanggal : **18 Mei 2021**

An. BUPATI SOPPENG  
KEPALA DINAS



**ANDI DHAMRAH, S.Sos, M.M**

**Pangkat : PEMBINA UTAMA MUDA**  
**NIP : 19700518 199803 1 007**



**Biaya : Rp. 0,00**

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
- Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan oleh **BJIK BPPT**
- Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di database DPMTSP-NAKERTRANS Kabupaten Soppeng (scan QRCode)



## **PEDOMAN WAWANCARA**

### **a. Wawancara Dengan Amil BAZNAS Kab. Soppeng**

1. Bagaimana latar belakang berdirinya BAZNAS Kab. Soppeng?
2. Bagaimana Visi dan Misi BAZNAS Kab. Soppeng?
3. Apa tugas pokok dan fungsi BaZNAS Kab. Soppeng?
4. Bagaimana etos kerja BAZNAS Kab. Soppeng?
5. Adakah susunan pengurus BAZNAS Kab.Soppeng?
6. Bagaimana program kerja BAZNAS Kab. Soppeng?
7. Bagaimana fungsi kepengurusan di lapangan?
8. Daerah apa saja yang merupakan wilayah kerja BAZNAS Kab. Soppeng
9. Bagaimana bentuk pengorganisasian yang dilakukan di BAZNAS Kab. Soppeng?
10. Bagaimana bentuk pengelolaan dan pengawasan terhadap Pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan BAZNAS Kab. Soppeng?
11. Upaya-upaya apa saja yang dilakukan BAZNAS Kab. Soppeng dalam menanggulangi kemiskinan dengan Zakat?
12. Hambatan/Kendala apa saja yang dialami BAZNAS dalam Upaya Mengentaskan Kemiskinan?
13. Bagaimana peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Soppeng selama Penyaluran Zakat Oleh Baznas Kab. Soppeng?

### **b. Wawancra Dengan Pemberi Zakat (Muzakki)**

1. Untuk menyalurkan ZIS Bapak/Ibu di BAZNAS Kab. Soppeng apakah karena kerelaan atau karena ada anjuran khusus dari pemerintah kabupaten?



2. Menurut Bapak/Ibu apakah BAZNAS Kab. Soppeng telah mensosialisasikan ZIS dengan optimal?
3. Menurut Bapak/Ibu, apakah peran ZIS dapat menanggulangi kemiskinan?
4. Apa saran dan usulan Bapak/Ibu untuk BAZNAS Kab. Soppeng?

**c. Wawancara Dengan Penerima Zakat (Mustahiq)**

1. Menurut Bapak/Ibu, apakah bantuan yang diberikan BAZNAS efektif membantu kesulitan anda?
2. Dana bantuan dari BAZNAS Kab. Soppeng lebih sering digunakan untuk apa?
3. Apakah bapak/ibu penerima bantuan Zakat, juga melakukan Zakat?
4. Bagaimana bentuk pemberian zakat oleh BAZNAS apakah berbentuk uang atau sembako?
5. Apa saran bapak/ibu terhadap pemberian Zakat oleh Baznas?
6. Apa harapan bapak/ibu mengenai pemberian zakat oleh Baznas?



Ahmad Arsyi Afdali, lahir di Tajuncu tanggal 25 Mei 1998. anak kedua dari dua bersaudara dari pasangan H. Ambo Acok Iskandar dan Hj. Syamsiah M. Penulis Memulai Pendidikan sekolah dasar di SDN 4 Kalenrunge pada tahun 2005-2011. Pada tahun itu juga peneliti melanjutkan pendidikan Madrasah Tsanawiah di Pondok Pesantren As'adiyah Putera II Pusat Sengkang selama tiga tahun kemudian lulus pada tahun 2014. Kemudian melanjutkan sekolah Madrasah Aliyah di Pondok Pesantren Al-Ikhlas Ujung Bone dan selesai pada Tahun 2017. Kemudian pada Tahun 2017 penulis mendaftarkan diri di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dan lulus di Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah dan Hukum dengan Jalur SPAN-PTKIN (Seleksi Prestasi Akademik Nasional Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri).

Dengan ketekunan, motivasi dan semangat yang tinggi untuk terus belajar dan berusaha, penulis telah berhasil menyelesaikan pengerjaan tugas akhir skripsi ini. Semoga penulisan tugas akhir skripsi ini mampu memberikan kontribusi positif bagi dunia Pendidikan.